

**PEMIKIRAN POLITIK BENEDICT ANERSON TENTANG  
NASIONALISME NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA  
(TELAAH PUSTAKA)**



**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Hubungan  
Intenasional Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu politik**

**SYAMSUL ASRI**

**E 131 03 013**

20 - Agustus - 07  
Fak. Sospol  
1 (satu) eks  
Hadiah  
286

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Judul** : **Pemikiran Politik Benedict Anderson Tentang Nasionalisme  
Negara-Negara Asia Tenggara**

**Nama** : **SyamsulAsri**

**NIM** : **E 131 03 013**

**Program Studi** : **Ilmu Hubungan Internasional**

**Jurusan** : **Politik Pemerintahan**

Telah disetujui dan diterima oleh tim penguji pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin makasar

**Ketua** : **Prof. Dr. J. salusu, MA**

**Sekretaris** : **Ishaq Rahman, S.Ip**

**Anggota** : **Drs. H. Darwis, MA**

**Drs. Aspiannor Masrie**

**Seniwati, S.Ip, M.Hum**

Handwritten signatures of the review team members, each followed by a dotted line for a name or title.

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : **Pemikiran Politik Benedict Anderson Tentang Nasionalisme  
Negara-negara Asia Tenggara**

**Nama** : **Syamsul Asri**

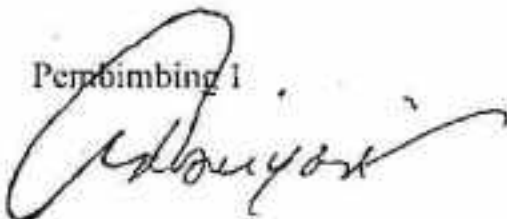
**Nim** : **E131 03 013**

**Program studi:** **Hub. Internasional**

**Jurusan** : **Politik Pemerintahan**

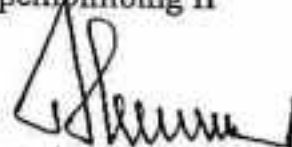
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Adi Suryadi Culla  
131 992 468

pembimbing II



Drs. Aspiannoer Masri  
131 992 457

Mengetahui

Ketua jurusan politik pemerintahan



Dr. Armin Arsyad, M.Si  
131 961 985



### **Kata pengantar**

Terukir syukur kepada DIA yang menjadikan kita karam dalam nikmat-NYA. Semoga salam senantiasa tercurah untuk manusia-manusia suci, titian-titian kecil bagi kita dalam mengeja sejarah. Semoga seluruh aktivitas keseharin kita selalu terberkahi. Amin.

Penyusun merasa mesti mengungkapkan jasa orang-orang di sekitar penyusun yang telah terpilih untuk penyusun repotkan, terutama kedua pembimbing penyusun (Dr. Adi Suryadi Culla dan Drs. Aspiannoer Masrie) yang telah terbiasa dengan ketergesa-gesaan penyusun, juga serangkaian diskusi hangat yang disajikan selama ini. Meski begitu, seluruh isi skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab penyusun, kedua orang tua penyusun, Syamsuddian A. Basir serta Hj. Kanang atas cinta yang tersaji hangat selama ini, juga kakek yang bungkuk memikul sejarah keluarga, teman-teman di LISA (Lingkar Sahabat) untuk canda serta pengetahuan/kebaikan yang muncul ketika dunia serasa menyempit, teman-teman di IAPIM (semoga kedewasaan tetap bercumbu dengan kegilaan), teman-teman KKN BORAY (♣), teman-teman di KORPALA (...bukankah Engkau jua alam itu, cinta?), teman-teman di HIMAH (Guru Pertama yang menantang), teman-teman di DICTA '03 (bisakah kelas meluas ke luar ruang-ruang lain selain di FIS?, kelas kehidupan?), teman-teman di Hml (semoga makin dewasa dan santun). Penyusun berterimakasih kepada Mardan Herik untuk waktu singkat yang menjejak (salam kopi dan Muthahari). Juga untukmu, cerminku, cahaya mataku, Zahra, terima kasih.

Permintaan maaf yang sebesar-besarnya juga penyusun sampaikan untuk seluruh senyum yang tak sempat penyusun balas, uluran tangan yang tak sempat tersambut, kebaikan yang terbalas kedengkian, juga sesal yang tak berjejak maaf. Maaf...

Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, karenanya penyusun dengan penuh kerendahatian meminta bimbingan agar skripsi ini layak memenuhi tujuan penulisannya. Semoga penyusunan skripsi ini berhasil mengajarkan banyak hal bagi penyusun.

Makassar, Agustus 2007

Penyusun

## ABSTRAK

Syamsul Asri, Nomor Pokok E 131 03 013, dengan judul skripsi **PEMIKIRAN POLITIK BENEDICT ANDERSON TENTANG NASIONALISME NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA**, di bawah bimbingan Dr. Adi Suryadi Culla Sebagai pembimbing I dan Drs. Aspiannoer Masrie Sebagai pembimbing II.

Literatur studi Hubungan Internasional mengenai pemikiran tokoh masih minim tersedia. Studi tokoh mampu memberi bahan refleksi yang kaya karena mampu menggambarkan perkembangan pemikiran suatu tokoh tertentu tanpa terpatok pada satu tradisi paradigma mapan. Nasionalisme merupakan hal paling azali dalam interaksi internasional. Setiap negara mengklaim suatu nasionalitas tertentu sebagai basis legitimasi dalam menjalin hubungan luar negeri. Masalah Penelitian ini ada dua, (1) mengetahui konsep nasionalisme Benedict Anderson, (2) mengetahui bagaimana nasionalisme negara-negara Asia Tenggara berdasarkan konsep Benedict Anderson tersebut. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif, yaitu berupa penggambaran tentang konsep nasionalisme menurut Benedict Anderson serta penggambaran tentang nasionalisme negara-negara Asia Tenggara berdasarkan konsep Benedict Anderson tersebut. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah studi pustaka mengenai karya-karya Benedict Anderson tentang nasionalisme, baik nasionalisme skala global maupun nasionalisme negara-negara Asia Tenggara. Disamping itu penyusun juga mengumpulkan data-data dari literatur berupa buku yang berhubungan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, nasionalisme menurut Benedict Anderson adalah paham/gerakan yang menghidupi nasion, dengan mengoperasikan dirinya sebagai objek pembayangan. Dan pembayangan ini pun dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Filipina) dalam menginisiasi nasionalismenya masing-masing.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....		ii
HALAMAN PENGESAHAN.....		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
ABSTRAK.....		vi
DAFTAR ISI.....		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
	B. RUMUSAN MASALAH.....	7
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	7
	D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
	E. METODE PENELITIAN.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
	A. KONSEP NASIONALISME.....	16
	B. NASIONALISME MENURUT PARA PAKAR.....	18
	C. KONSEP NASIONALISME BENEDICT ANDERSON MENURUT PARA PAKAR.....	27
	D. KRITIK TERHADAP KONSEP NASIONALISME BENEDICT ANDERSON.....	34

BAB III	PANDANGAN UMUM.....	40
	A. BIOGRAFI SINGKAT BENEDICT ANDERSON.....	40
	B. NASIONALISME MENURUT BENEDICT ANDERSON .....	44
	C. RELEVANSI PEMBAHASAN NASIONALISME DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	54
	D. RELEVANSI PEMIKIRAN BENEDICT ANDERSON TERHADAP STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	59
BAB IV	PEMBAHASAN.....	65
	A. ASAL-USUL ASIA TENGGARA .....	65
	B. SENSUS, PETA DAN MUSEUM SEBAGAI INSTITUSI PEMBAYANGAN.....	67
	C. NASIONALISME INDONESIA.....	77
	D. NASIONALISME THAILAND .....	82
	E. NASIONALISME FILIPINA .....	86
BAB V	PENUTUP.....	91
	A. KESIMPULAN.....	91
	B. SARAN .....	92

DAFTAR PUSTAKA



# PEMIKIRAN POLITIK BENEDICT ANDERSON TENTANG NASIONALISME NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Martin Griffiths, penulis buku *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional* (2001), mengelompokkan Benedict Richard O'Gorman Anderson (selanjutnya disebut Ben Anderson) ke dalam kelompok pengusung paradigma Teori Bangsa.<sup>1</sup> Paradigma ini mencoba menggali asal-usul kesadaran historis dari suatu negara-bangsa sehingga posisinya dalam dunia internasional hari ini bisa lebih dipahami. Oleh banyak pihak, posisi ini disebut perspektif kultural-empatis<sup>2</sup> yang sering dilawankan dengan perspektif struktural. Sejak dekade 1950-an, Ben Anderson telah melahirkan puluhan karya mengenai politik, ekonomi, budaya dan sosial dengan keragaman isu yang memikat. Keluasan cakupan bangunan pemikiran Ben Anderson telah memberinya kekayaan argumen yang lebih dari cukup sehingga ia bisa dengan lancar melontarkan kritik terhadap asumsi-asumsi yang dianggap mapan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Martin Griffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi HI*, Murai Kencana. Jakarta; 2001. hal. 345

<sup>2</sup> Vedi R. Hadis, *Budaya, Politik dan Perubahan Sosial*, Gramedia, Jakarta; 1992. hal. 9-10

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 5

Kesan pemberontakan Ben Anderson sangat terasa di bidang yang dianggap sebagai bidang spesialisasi Ben Anderson, yaitu nasionalisme. Jika ada 'isme' dengan pendukung terbanyak sekaligus diskursus paling sepi, maka itu adalah nasionalisme. Gagasan-gagasan tentang nasionalisme sepatutnya dikaji lebih dalam lagi agar posisi sebuah nasion dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan nasion lain dalam tatanan global bisa lebih dimengerti.

Kurangnya perhatian atas diskursus nasionalisme berakar dari kenyataan berupa terdapatnya kesadaran yang sifatnya terberi secara seketika dalam benak penganutnya dan disosialisasikan dengan cara yang begitu gencar, entah lewat upacara bendera, hari libur nasional, museum, taman makam pahlawan, sistem pendidikan, film, novel, nama tempat dan lokasi, musik, monumen, sensus, peta hingga kaos oblong, sehingga sangat sedikit upaya yang dilakukan untuk mempertanyakan kembali esensi nasionalisme sebagai diskursus. Diskursus nasionalisme ramai pada generasi pertama revolusi kemerdekaan, namun seiring waktu, internalisasi nasionalisme berlangsung pasif dan monolog, diterima dan dilazimkan begitu saja sehingga tinggallah nasionalisme sebagai fakta sosial dan politik, disertai begitu minimnya usaha yang dikerahkan untuk mendiskusikan kembali nasionalisme, sehingga menjadi jelas posisi nasionalisme dalam sejarah.

Sejak Perang Dunia II, setiap revolusi yang sukses harus merumuskan dirinya dalam wacana nasional, dalam arti menancapnya diri diatas wilayah tertentu; di dalam ruang sosial tertentu, yang diwarisi dari masa silam pra-revolusioner.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Insist & Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002. hal. 3

Tesis ini menunjukkan bahwa sejak tatanan global imperium Inggris runtuh, maka di hampir setiap belahan bumi, ada saja nasion yang merdeka. Banyak ramalan yang mengandaikan nasionalisme akan ambruk<sup>5</sup>, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ke-nasional-an merupakan nilai universal yang mendasari interaksi antar nasion dewasa ini. Rose Poole dalam buku *Moralitas dan Modernitas* (1992) menyatakan dengan tegas bahwa nasionalisme merupakan anak kandung modernitas. Modernitaslah yang melahirkan dan menjaga nasionalisme.<sup>6</sup> Modernitas dilandasi oleh pengakuan akan suatu subjek yang utuh (dalam hal ini nasion) dengan orientasi ke depan berupa perkembangan dan kemajuan yang sifatnya linear. Nasionalisme dengan demikian telah dan selalu menyediakan justifikasi historis-psikologis bagi keberadaan nasion dan tujuan yang hendak dicapainya, gejala ini bertahan hingga hari ini.

Bahwa globalisasi akan meleburkan jarak, waktu dan perbedaan, malah mengukuhkan perbedaan itu. Di tengah kepingan citra dan rujukan identitas, ternyata nasion perlu merumuskan dan mengukuhkan keberadaannya, entah untuk bertahan dari penyamaan atau untuk menegaskan klaim kekuasaannya atas sebuah teritori maupun ruang sosial.<sup>7</sup> Akan ada tuduhan yang kurang hati-hati bahwa hari ini nasion dan nasionalisme telah mati, terganti perusahaan multinasional dengan ide ekspansi pasarnya. Namun periode 1970-an dan 1980-an ke atas menunjukkan bahwa arus barang/jasa yang melintasi perbatasan antar-nasion tidak lebih besar di

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>6</sup> Lihat Rose Poole, *Moralitas dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta; 1992.hal. 122-3

<sup>7</sup> Lihat Gocnawan Mohamad, *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*. Pustaka Alvabet, Yogyakarta; 2001. bandingkan dengan Ben Anderson, *Hantu Komparasi*, Qalam, Yogyakarta; 2002. hal. 109

banding periode 1920-1940. Bolehlah di katakan aktivitas perusahaan multinasional meningkat drastis selama tiga dasawarsa terakhir, namun peran nasion dalam mewujudkan, menjaga, dan dalam banyak kesempatan turut serta menjalankan aktivitas perusahaan multinasional sangat vital.

Ini terbukti dengan lahirnya banyak kebijakan ekonomi yang sifatnya defensif, berupa peningkatan bea masuk barang/jasa atau yang tak kalah penting, pembangunan ekonomi dalam negeri agar mampu *bersaing* dengan *nasion lain* dalam *pasar internasional*.

Hampir setiap tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima anggota baru, dan banyak nasion tua dengan sejarah konsolidasi yang panjang mendapati dirinya dihadapkan pada subnasionalisme yang lebih kecil, seperti kasus pasca keruntuhan Uni Soviet.<sup>8</sup> Namun meskipun faktanya agak jernih, konsep nasion atau bangsa, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, merupakan konsep-konsep yang susah sekali dirumuskan, apalagi dianalisis,<sup>9</sup> namun demikian adalah suatu upaya yang mungkin untuk menyulam fakta-fakta yang jelas tadi menjadi jaring teori yang punya kemungkinan memberi kejelasan ihwal nasionalisme.

Disinilah peran Benedict Anderson dalam mengonsepsi nasionalisme sebagai paham yang dianut komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Jika ada unsur yang membedakan defenisi Ben Anderson dengan defenisi dari pakar yang lain, maka unsur tersebut

<sup>8</sup> Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities*, hal. 3-4

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 4

adalah aspirasi; nasionalisme bukan sekadar gejala psikologis atau fenomena derivatif dari perkembangan industri dan manajemen masyarakat kapitalis, namun juga proyek identitas diri dengan orientasi penemuan makna, yang pada gilirannya, proyek tersebut tertuang dalam kebijakan yang sifatnya politis.

Bukan sebuah kebetulan jika Asia Tenggara merupakan tempat pilihan bagi aplikasi konsep di atas. Selain karena Asia Tenggara merupakan wilayah dengan warna pascakolonial yang begitu kental, dengan waktu revolusi yang hampir bersamaan, Asia Tenggara adalah wilayah dengan nasion-nasion yang begitu jelas perbedaannya satu sama lain meskipun berasal dari rumpun yang sama.

Selain karena alasan di atas, Asia Tenggara terutama Indonesia, adalah rumah intelektual bagi Ben Anderson. Ia “menemukan” Indonesia bukan hanya dengan “kepala” tapi juga dengan “dada”. Kecintaan Ben Anderson pada Indonesia diakuinya secara eksplisit di banyak tempat dalam karangannya,<sup>10</sup> bukan saja karena “proyek” Indonesia menjadi sumber landasan bagi teori nasionalismenya secara makro dan global. Ben Anderson terkenal sebagai salah satu tokoh yang begitu keras menampik pisau analisis Barat dalam menelaah subjek penelitiannya dan lebih menekankan pendekatan yang berasal dari narasi subjektif subjek penelitiannya. Ini berimplikasi sangat jauh, sehingga adalah sesuatu yang lumrah jika Indonesia di mata Ben Anderson lebih dari sekedar medan pengujian teori,

---

<sup>10</sup> Lihat Benedict Anderson, *Kuasa-Kata*, Matabangsa, Yogyakarta; 2000. hal. 17-8, 23

adalah aspirasi; nasionalisme bukan sekadar gejala psikologis atau fenomena derivatif dari perkembangan industri dan manajemen masyarakat kapitalis, namun juga proyek identitas diri dengan orientasi penemuan makna, yang pada gilirannya, proyek tersebut tertuang dalam kebijakan yang sifatnya politis.

Bukan sebuah kebetulan jika Asia Tenggara merupakan tempat pilihan bagi aplikasi konsep di atas. Selain karena Asia Tenggara merupakan wilayah dengan warna pascakolonial yang begitu kental, dengan waktu revolusi yang hampir bersamaan, Asia Tenggara adalah wilayah dengan nasion-nasion yang begitu jelas perbedaannya satu sama lain meskipun berasal dari rumpun yang sama.

Selain karena alasan di atas, Asia Tenggara terutama Indonesia, adalah rumah intelektual bagi Ben Anderson. Ia "menemukan" Indonesia bukan hanya dengan "kepala" tapi juga dengan "dada". Kecintaan Ben Anderson pada Indonesia diakuinya secara eksplisit di banyak tempat dalam karangannya,<sup>10</sup> bukan saja karena "proyek" Indonesia menjadi sumber landasan bagi teori nasionalismenya secara makro dan global. Ben Anderson terkenal sebagai salah satu tokoh yang begitu keras menampik pisau analisis Barat dalam menelaah subjek penelitiannya dan lebih menekankan pendekatan yang berasal dari narasi subjektif subjek penelitiannya. Ini berimplikasi sangat jauh, sehingga adalah sesuatu yang lumrah jika Indonesia di mata Ben Anderson lebih dari sekedar medan pengujian teori,

---

<sup>10</sup> Lihat Benedict Anderson, *Kuasa-Kata*, Matabangsa, Yogyakarta; 2000. hal. 17-8, 23

## **B. Rumusan Masalah**

Analisa terhadap konsep nasionalisme bisa menjembatani jarak antara analisis struktural dan analisis kultural. Analisis kultural yang ditawarkan pemikiran politik Ben Anderson sebagaimana yang hendak penyusun angkat diharapkan mampu menghadirkan analisis kultural sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengangkat dua masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep nasionalisme menurut Benedict Anderson ?
2. Bagaimana rumusan Benedict Anderson tersebut tentang konsep nasionalisme negara-negara Asia Tenggara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Menurut penyusun ada dua tujuan yang bisa di petik dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep nasionalisme menurut Ben Anderson.
2. Mengetahui dan menjelaskan konsep nasionalisme negara-negara Asia Tenggara berdasarkan konsep Ben Anderson tersebut di atas.

### **2. Kegunaan**

Menurut penyusun ada dua kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

## **B. Rumusan Masalah**

Analisa terhadap konsep nasionalisme bisa menjembatani jarak antara analisis struktural dan analisis kultural. Analisis kultural yang ditawarkan pemikiran politik Ben Anderson sebagaimana yang hendak penyusun angkat diharapkan mampu menghadirkan analisis kultural sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengangkat dua masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep nasionalisme menurut Benedict Anderson ?
2. Bagaimana rumusan Benedict Anderson tersebut tentang konsep nasionalisme negara-negara Asia Tenggara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Menurut penyusun ada dua tujuan yang bisa di petik dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep nasionalisme menurut Ben Anderson.
2. Mengetahui dan menjelaskan konsep nasionalisme negara-negara Asia Tenggara berdasarkan konsep Ben Anderson tersebut di atas.

### **2. Kegunaan**

Menurut penyusun ada dua kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini, yaitu :



1. Kegunaan akademis berupa bertambahnya literatur tentang tokoh studi Hubungan Internasional sehingga sedikit banyaknya bisa memperluas referensi mahasiswa Hubungan Internasional universitas Hasanuddin tentang subjek penelitian tersebut, utamanya jika hasil penelitian ini digunakan sebagai literatur pembanding dalam mengkaji tokoh lain dalam studi Hubungan Internasional, suatu hal yang butuh elaborasi lebih lanjut guna pengembangan studi ini di masa mendatang.
2. kegunaan praktis yakni proposal ini disusun sebagai prasyarat bagi penyusun untuk mengikuti ujian komprehensif.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pemikiran politik telah lazim dibahas sebagai pendekatan yang menempatkan pengetahuan tentang politik sebagai objek kajiannya. Pendekatan ini lazim ditempuh jika epistemologi dan aksiologi suatu sistem dan aktor politik tertentu ingin dikaji dalam hubungannya dengan perkembangan politik tertentu. Sebagai contoh, Revolusi Islam Iran yang membuka mata dunia bahwa agama masih mendapat tempat dalam tradisi politik kontemporer telah membuat banyak pakar mendiskusikan 'pemikiran politik islam'. Pendekatan ini sangat bermamfaat dalam menelaah nasionalisme sebagai fenomena politik, agar nasionalisme bisa lebih jelas kandungan intelektualnya dan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas elit negara dalam menjalankan legitimasi kekuasaannya.

nasional dan penentuan-diri.<sup>15</sup> Namun nasionalisme telah membungkam liberalisme dengan kenyataan bahwa nasionalisme bisa tetap ada meski telah terpisah dari liberalisme, seperti yang dipraktekkan Jerman di bawah Nazi atau Uni Soviet di bawah Stalin.

Nasionalisme merupakan fenomena sosial politik yang paling absah hari ini. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan tepatnya nasionalisme lahir, namun angka tiga ratus tahun di kalangan pakar merupakan angka yang mendekati kesepakatan bersama. Nasionalisme atau faham kebangsaan telah mengalami masa konsolidasi yang begitu panjang. Adalah Rene Descartes, filsuf asal Prancis, di tengah keputungan skeptisisme Eropa, mengusulkan tesis *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada). Konsep 'AKU' Descartes muncul sebagai respon terhadap gerakan skeptisisme Eropa yang muncul sebagai reaksi atas hilangnya sandaran nilai lama, yakni lunturnya pengaruh Gereja serta digugatnya otoritas Dinasti Kerajaan yang memerintah sebagai pengejawantahan Firman Tuhan di muka bumi. Tesis "AKU" merupakan kulminasi dari subjek yang utuh, mandiri, determinan atas dirinya sendiri dan terobsesi pada kemajuan yang bergerak linear ke depan.

"AKU" Descartes tidak hanya diadopsi pada level mikro atau individu. Asumsi bahwa ada subjek utuh yang mendiami dan menjalankan sejarah diadopsi juga pada level makro atau nasion. Konsolidasi lahirnya negara modern dengan

---

<sup>15</sup> Lihat Poole, *Moralitas dan Modernitas*. Hal. 120

nasionalitas sebagai ciri esensialnya berurat berakar pada pencarian kesamaan, landasan untuk membangun konsensus, sembari menyingkirkan anasir-anasir asing, lantas menatap kedepan, sejarah di depan.<sup>16</sup>

Rumusan di atas dikembangkan lebih jauh oleh Hegel. Filsuf asal Jerman ini memberi isi pada kerangka yang ditinggalkan Descartes. Pengaruh Hegel tak terbantahkan dalam studi politik kontemporer. Tak ada satupun mazhab politik yang tak bersinggungan dengannya, entah untuk sepakat atau untuk membantah Hegel. Di mata Hegel, nasionalisme merupakan tujuan dari dialektika historis yang tak terbantahkan; faham yang mengoperasikan diri sebagai landasan riil bagi nasion dalam memperoleh dan menjalankan kekuasaannya.<sup>17</sup> bisa dikatakan bahwa bagi Hegel, dialektika dan nasionalisme tak dapat dipisahkan dan menjadi penjelas (penjustifikasi) keberadaan suatu nasion. Dikenal sebagai filsuf liberal, Hegel dengan antusias menyandingkan liberalisme dan nasionalisme sebagai faham yang saling mengandaikan satu sama lain, sebuah tesis yang mesti diuji kesahihannya hari ini, mengingat praktek-praktek liberalisme tidak selalu dijamin oleh nasionalisme. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa otoritarianisme justru dijustifikasi oleh nasionalisme.

Teoritikus modern tentang nasionalisme telah berhasil memberi definisi dengan tingkat eksplanasi yang cukup tinggi terhadap nasionalisme. Pendapat-pendapat teoritikus akademis telah bercampur aduk dengan pendapat nasionalis dari

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 38

<sup>17</sup> Lihat G. H. Sabine, *Teori-Teori Politik*, Bina Cipta, Bandung; 1992. hal 265

negara-negara dunia ketiga yang baru saja mengalami revolusi. Hasilnya, bangunan konsep nasionalisme terlihat begitu kokoh meski acak, beragam dan tumpang tindih.

Menurut Ben Anderson nasionalisme adalah faham yang melandasi, menghidupi dan memberi tujuan pada suatu nasion. Dan nasion sendiri di mata Ben Anderson<sup>18</sup> : “adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan”.

Dari sini, Ben Anderson kemudian menjelaskan defenisinya sendiri secara lebih jelas. Ia kemudian melanjutkan: “bangsa adalah suatu *yang terbayang* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka”.

Sebuah nasion, anggaplah Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, masing-masing penduduknya tidak akan mengenal lebih dari segelintir warga Indonesia yang dibayangkan sebagai sesama orang Indonesia. Selanjutnya, Ben Anderson menguraikan bahwa “Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat *terbatas* karena bahkan bangsa-bangsa paling besarpun, yang anggotanya mungkin semiliar manusia, memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. Diluar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain”.

Seseorang di pulau Sumatera akan menganggap sesama orang-orang Maluku yang jelas-jelas berbeda garis keturunan, agama, budaya, akar bahasa dengan dirinya

---

<sup>18</sup> Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities*, hal. 8-11

dan menganggap asing orang melayu di negara Malaysia yang jelas-jelas memiliki akar-akar bahasa, agama dan budaya yang sama dengan dirinya. Di sini, Ben Anderson melanjutkan penjelasannya bahwa "bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang *berdaulat* lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu dimana Pencerahan dan Revolusi memporakporandakan keabsahan ranah Dinasti berjenjang berkat pentahbisan oleh Tuhan sendiri".

Merupakan sesuatu yang disepakati bahwa nasionalisme merupakan kesadaran yang timbul beriringan dengan melemahnya dua basis legitimasi yang menyediakan rujukan identitas selama ini setidaknya di Eropa yaitu Gereja dan Dinasti, meski Ben Anderson mencatat bahwa nasionalisme mesti dilihat bukan sebagai pengganti Gereja dan Dinasti, melainkan menempatkan kemungkinan tumbuhnya nasionalisme di tengah dua basis legitimasi tadi.

Ben Anderson mengakhiri penjelasannya tentang defenisi nasionalisme miliknya dengan menguraikan bahwa, "akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah *komunitas*, sebab tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu di pahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar". Akhirnya, sampailah kita pada elemem defenisi Ben Anderson yang terakhir. Nasionalisme selalu menyediakan rasa kebersamaan yang menjustifikasi kohesi sosial sebagai ruang komunikasi bersama. Ruang komunikasi tersebut tidak selamanya ideal dan bebas dari dominasi antar anggota komunitas sebagaimana yang

diimpikan oleh Habermas,<sup>19</sup> namun kadang kala ruang komunikasi tersebut juga terdistorsi oleh penindasan satu atas yang lain. Namun nasionalisme selalu menyediakan alasan untuk tidak menolak komunitas serta memberi kesempatan ke dua bagi komunitas tersebut agar di masa depan bisa memperbaiki dirinya. Inilah tepatnya yang dirasakan oleh seluruh buangan politik yang tetap menambatkan dirinya pada sebuah nasion meskipun ia berada jauh diluar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan *metode deskriptif*. Di mana pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang memusatkan pada pemecahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat akurat. Formulasi kerjanya dilakukan dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan kemudian dilakukan analisis.

### **2. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *studi kepustakaan*, oleh kerena itu bahan atau meterialnya sebagian besar dari buku-buku yang dikemukakan oleh para pakar atau peneliti pakar di bidangnya yang berkaitan dengan bidang nasionalisme dalam studi Hubungan Internasional

---

<sup>19</sup> Lihat Habermas dalam Yasraf A. Piliang, *Transpolitika*, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung; 2005. hal 32

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik dokumentasi*. Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti, yang bersumber dari berbagai dokumen yang ada. Teknik dokumentasi ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik bersumber dari koran-koran majalah dan sebagainya. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Teknik Analisis

Berkenaan dengan data yang didapat maka penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*. Proses yang dilalui adalah pengumpulan data, display data-data dan pengambilan kesimpulan.

Berbagai data yang dikumpulkan digerakan menuju sumber kajian yang paling relevan dan paling padat serta harus cukup bisa dipercaya dan valid. Kemudian data-data itu disusun ke dalam pola-pola tertentu, tema-tema tertentu, titik-titik fokus tertentu yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Pada proses ini akan dilakukan penilaian data dengan melihat derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Nasionalisme

Nasionalisme merupakan fenomena dengan usia yang relatif seumur dengan modernisme. Bahkan, nasionalisme adalah produk modernisme.<sup>1</sup> Modernisme bisa dilambangkan dengan upaya intelektual, moral, spiritual, ekonomi, politik dan, terutama kultural untuk lari dari legitimasi kekuasaan di luar individu, yaitu kekuasaan dari para raja dan Gereja.

Para penentang raja dan Gereja pertama-tama menunjukkan bahwa keadaan begitu korup dan non-egaliter. Dimana-mana para orang kaya yang dekat dengan raja dan Gereja menikmati posisi yang begitu agung, sedangkan orang miskin yang menjalani hidup tanpa dukungan raja dan Gereja begitu terhina. Yang ditawarkan kemudian oleh para penentang ini adalah kedaulatan untuk menentukan determinasi atas diri sendiri pada level individu yang bergerak meluas ke level kolektif berupa kedaulatan nasional.<sup>2</sup>

Jika lari dari Gereja disulut oleh Martin Luther<sup>3</sup>, maka lari dari para raja disulut oleh tiga revolusi. Revolusi pertama meletus di Inggris pada tahun 1688, berawal dari ketidak sepakatan anggota dewan terhadap raja yang berakhir dengan digantungnya sang Raja. Kekuasaan kemudian dipecah dan sebagian didistribusikan

---

<sup>1</sup> Rose poole, *modernitas dan moralitas*, hal. 122-3

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 127

<sup>3</sup> Benedict Anderson, *imagined communities*, hal. 58-9



kepada rakyat dalam bentuk Dewan Perwakilan. Bentuk penyelenggaraan kekuasaan di Inggris hari ini adalah akibat dari peristiwa tersebut.

Revolusi ke dua meledak di Amerika. Tiga belas koloni sepakat untuk, karena alasan-alasan yang sifatnya psikologis-ekonomis-kultural, melepaskan diri dari Inggris dan Spanyol. Meski pada awalnya dihadapi dengan angkatan bersenjata, ketiga belas koloni sukses untuk tidak hanya bebas dari kewajiban membayar pajak kepada Inggris dan Spanyol, namun juga bebas menatap sejarahnya ke depan, bebas menulis narasi kehidupannya sendiri. Peristiwa ini mendorong konsolidasi lebih lanjut untuk melahirkan *Declaration Of Human Rights*.

Terinspirasi dari revolusi Amerika yang sukses, Prancis pun meneggelamkan diri ke dalam revolusi. Melalui masa konsolidasi yang panjang raja Louis XVI yang korup, berhasil dipenggal. Maka lengkaplah cerita tentang berakhirnya seluruh otoritas dan legitimasi yang berasal dari luar individu setidaknya di Eropa dan Amerika Utara.

Meski para pakar berbeda pendapat tentang tahun kelahiran nasionalisme, namun abad ke-16 dipercaya sebagai abad kelahiran nasionalisme. Adalah salah, menurut Ben Anderson, jika memandang nasionalisme sebagai pengganti agama dan dinasti. Ben Anderson lebih tertarik untuk melihat nasionalisme sebagai kesadaran yang hanya dimungkinkan pertumbuhannya seiring dengan agama dan dinasti. Ketiganya bukanlah wujud kontradiksi satu sama lain, namun lebih merupakan jalinan sejarah yang sifatnya agak linear. Ini terlihat dengan tetap terpeliharanya,

meski redup, semangat religius dan semangat dinasti yang telah mentransformasikan dirinya menjadi lebih Modern-Weberian di masa sekarang.<sup>4</sup>

## B. Nasionalisme Menurut Para Pakar

Meski pengelompokan pendekatan ke dalam dua genre, liberal dan radikal lazim dilakukan untuk melihat perbandingan keduanya, namun penyusun memilih menjelaskan nasionalisme dari perpektif para pakar *per se*, tanpa mengelompokkan para pakar tersebut ke dalam tradisi besar manapun. Tujuan dari pendekatan seperti ini adalah agar variabel-variabel pembentuk nasionalisme bisa tampil lebih alami tanpa dicemari oleh tendensi penjelasan tradisi apapun.

### 1. Ernest Gellner

Gellner melihat nasionalisme dan bangsa sebagai efek dari transisi masyarakat, dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.<sup>5</sup> Kebutuhan pada birokrasi yang secara esensial berfungsi menyeragamkan agar tercipta tatanan adalah niscaya pada masyarakat industrial. Kultur seragam ini dibutuhkan agar pembacaan terhadap masa lalu dan proyeksi terhadap masa depan dimungkinkan untuk dijalankan. Ciri paling menonjol dari masyarakat industri adalah kesadaran untuk mengantisipasi masa depan, dalam arti kata regenerasi birokrasi-teknologis dengan tingkat epektifitas tinggi agar produktifitas tetap terjaga. Penjaga kultur seragam, itulah negara (*state*), tata komunitasnya disebut bangsa (*nation*). Paham/gerakan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>5</sup> Gellner dalam Herry Priyono, *Esei-Esei Bentara 2003*. Kompas, Gramedia, Jakarta; 2003 hal. 56

menciptakan tata itu disebut nasionalisme (*nationalism*). Dalam kata-kata Gellner<sup>6</sup>: “nasionalisme bukanlah bangkitnya kekuatan masa lalu yang tertidur, meski punya klaim seolah-olah demikian. Dalam kenyataan, nasionalisme merupakan konsekuensi bentuk baru pengorganisasian masyarakat yang bersandar pada budaya-tinggi yang dibentuk oleh persekolahan, dan dijaga oleh negara. Bangsa sebagai komunitas alamiah adalah sebuah mitos....”

Bagi Gellner, para inteligensia borjuislah yang menjadi motor utama gerakan nasionalisme, rakyat hanya elemen tak sadar yang digiring ke dalam rekayasa kultur keseragaman industrialisasi.

Perry Anderson, kakak kandung Ben Anderson, melepaskan kritik yang cukup tajam terhadap Gellner. Adalah vital menaruh analisa pada unsur pembentuk nasionalisme, namun penjelasan seperti itu berisiko membuang “dimensi makna komunitas yang terlibat dalam nasionalisme; bukan fungsinya bagi industri, melainkan pemenuhannya pada identitas diri”.<sup>7</sup>

## 2. Eric J. Hobsbawm

Hobsbawm, salah seorang guru awal Ben Anderson, mendefinisikan nasionalisme sebagai paham atau gerakan yang dimotori oleh para borjuis yang memperjuangkan semacam tradisi rekaan (*invented tradition*) yang diciptakan untuk

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lihat Perry Anderson dalam Herry Priyono, *Esei-Esei Bentara 2003*. Kompas, Gramedia, Jakarta: 2003 hal. 57

menyalurkan insting komunal massa. Insting ini disalurkan lewat misalnya penghormatan bendera, lagu nasional dan simbol lain.<sup>8</sup>

### 3. Jack Snyder

Guru besar ilmu politik Universitas Columbia ini dengan nada yang agak negatif menghubungkan nasionalisme dengan kerusuhan-kerusuhan skala nasional sebagai wajah dari demokratisasi yang gagal.<sup>9</sup> Nasionalisme, di mata Snyder, adalah upaya politisasi SARA (suku, ras dan agama) oleh elit dengan tujuan terciptanya chaos yang bisa dimanfaatkan untuk mendulang tujuan pragmatis kelompok tertentu.

Ada anggapan bahwa demokratisasi dengan sendirinya akan mendatangkan keamanan sosial-ekonomi-politik bagi masyarakat. Snyder merupakan satu dari sedikit tokoh yang menentang asumsi di atas. Menurutnya, sejak revolusi Perancis, demokratisasi selalu meminta bayaran tinggi dari masyarakat berupa biaya sosial-politik dalam menghadapi masa pasca kejatuhan rezim totaliter. Pihak-pihak dalam negeri begitu getol membincangkan dan membagi kekuasaan. Potensi konflik, jika tidak dikelola, begitu besar sehingga sangat gampang dibelokkan menjadi ancaman kerusuhan dan kekerasan.

Ada empat tipe nasionalisme, atau politisasi SARA, menurut Snyder<sup>10</sup> ;

1. Nasionalisme revolusioner di Prancis, timbul mana kala semua institusi negara sudah lumpuh dan elit nasional berhasil mengalihkan kebencian

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Snyder dalam *Esei-Esei Bentara 2002*, Gramedia, Jakarta; 2002. hal. 55

<sup>10</sup> *Ibid.*

massa dari diri mereka menjadi kebencian terhadap pihak asing yang tercititakan oleh doktrin bahwa pihak asing dan berbagai anasir dalam negeri, mengancam kepentingan nasional.

2. Nasionalisme kontra revolusioner di Jerman, timbul manakala birokrasi negara kuat, namun lembaga perwakilan rakyat lemah. Para elit melihat peluang mempertahankan status quo dengan mengkambinghitamkan lawan sebagai golongan revolusioner yang mengancam keutuhan negara.
3. Nasionalisme etnik di Serbia, muncul karena birokrasi dan lembaga perwakilan rakyat belum berfungsi, atau belum ada. Masyarakat lantas melirik tradisi dan kesamaan garis keturunan sebagai penyangga nilai bersama.
4. Nasionalisme kewarganegaraan di Inggris, timbul dari negara dengan lembaga perwakilan yang maju dan pers yang bebas. Nasionalisme ini didasarkan pada hak dan kewajiban individu, bukan golongan.

Snyder melihat bahwa hanya nasionalisme atau politisasi SARA jenis keempatlah yang paling kondusif menciptakan kesejahteraan ekonomi, politik dan sosial.<sup>11</sup>

#### 4. J.Frankle

Frankle berpendapat bahwa memaknai nasionalisme akan menjadi lebih mudah apabila nasionalisme tersebut dibahas sebagai salah satu ciri dari hubungan-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

hubungan antar negara. ini berlandaskan penegasan Frankle bahwa nasionalisme adalah keadaan pikiran saja tanpa memiliki realitas objektif.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Frankle berpendapat bahwa istilah negara dan istilah bangsa tidak identik, namun diakuinya bahwa kedua istilah tersebut memiliki hubungan meski hubungan tersebut berbeda menurut waktu dan tempat; kadang-kadang negara mendahului bangsa seperti yang terdapat di Eropa Barat tetapi kadang pula bangsa mendahului negara seperti yang terdapat di Eropa Tengah dan Timur; ada negara yang bersifat multinasional seperti Swiss, ada pula negara yang mempunyai kelompok minoritas banyak, juga ada bangsa yang terbagi secara terpisah ke dalam beberapa negara seperti Korea.<sup>13</sup>

#### 5. T. A. Coulumbis dan J. H. Wolfe

Coulumbis dan Wolfe menyatakan bahwa nasionalisme adalah paham/kesadaran atau gerakan yang menyediakan institusi bagi negara-bangsa. Sebelum menelaah lebih jauh tentang nasionalisme, Coulumbis dan Wolfe menyarankan agar kita terlebih dahulu mendekati konsep negara-bangsa. Coulumbis dan Wolfe menyatakan<sup>14</sup>;

bangsa sebagai suatu konsep berkenaan dengan identitas etnik serta kultur dari sekelompok orang tertentu, berperan untuk menyelenggarakan hubungan yang bersifat emosional yang bersumber pada identitas kultural sehingga dimungkinkan terjadi hubungan emosional tersebut. Sedangkan negara merupakan suatu

<sup>12</sup> Lihat Frankle dalam Soeprapto R., *Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1997. hal. 114

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 112

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 111

unit politik yang dikaitkan dengan teritorial, populasi dan otonomi pemerintah untuk mengontrol wilayah berikut penduduknya serta memberikan legitimasi atas yurisdiksi politik dan hukum bagi warga negaranya.

Berlandaskan konsep tersebut, Coulumbis dan Wolfe menyatakan bahwa dunia internasional hari ini terbentuk dari pembauran atau perpaduan antara batas-batas kultur dan politik dalam konteks pelaksanaan kontrol politik yang dilakukan oleh satu otoritas sentral atas suatu wilayah berikut penduduknya. Dari sini, bagi Coulumbis dan Wolfe, pemahaman terhadap nasionalisme bersifat urgen dalam memahami politik global.

Telaah lebih jauh yang dilakukan oleh Coulumbis dan Wolfe membawa keduanya pada titik defenitif bahwa nasionalisme adalah kekuatan. Apakah nasionalisme akan menjadi kekuatan positif atau negatif, Coulumbis dan Wolfe melihat bahwa hal tersebut sangat tergantung konteksnya.<sup>15</sup>

Pada akhir analisisnya dalam fenomena integrasi dan disintegrasi, bagi Coulumbis dan Wolfe, nasionalisme bisa menjadi unsur perekat (integrasi) dan bisa pula menjadi unsur peretas (disintegrasi). Kekuatan nasionalisme tersebut hendaknya mampu dipandang sebagai kekuatan moderat yang membawa kesejahteraan tanpa mesti terjebak dalam dua pilihan sulit; mengorbankan pluralisme kultural atas nama ketertiban dunia atau menyerahkan kesejahteraan umum kepada keinginan beberapa negara besar yang tamak.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 114-5

## 6. Ernest Renan

Di mata Renan, nasionalisme merupakan paham yang merefleksikan kesadaran suatu bangsa dimana bangsa adalah "solidaritas agung yang terbentuk dari penderitaan bersama".<sup>16</sup> Nasionalisme adalah sublimasi dari rasa takut, gentar, dan getir yang dilahirkan oleh kolektivitas dalam merasakan penderitaan.

Bagi Renan, "intisari sebuah bangsa adalah bahwa di dalamnya, setiap individu memiliki banyak hal yang menjadi kepunyaan bersama dan sekaligus melupakan hal lain yang menjadi kepunyaan bersama".<sup>17</sup> Untuk menjadi bangsa, individu dan masyarakat meletakkan di hadapan dirinya sejumlah hal untuk diingat dan sejumlah hal untuk dilupakan. Dengan kata lain, konsolidasi "melupakan" dan "mengingat" hendaknya telah mencapai tingkat tertentu sehingga sekumpulan orang bisa disebut bangsa.

Renan begitu ironis menatap nasionalisme. Baginya, nasionalisme semacam neurosis sejarah, suatu bentuk adaptasi yang kelewatan. Bagaimana tidak, misalnya, Renan menertawakan nasionalis Perancis yang mengaku keturunan Charlemagne dengan 'lupa' bahwa sisi Charlemagne sebenarnya seorang 'Jerman'.

## 7. Antony Smith

Menurut Smith, nasionalisme adalah paham yang dianut oleh komunitas kultural-politik yang ada dalam gerak berayun antara pencarian identitas ke masa lalu dan pencarian arah pada rentang sejarah ke depan. Bahkan lebih jauh, Smith

<sup>16</sup> Lihat Renan dalam Herry Priyono, *Esei-Esei Bentara 2003*, hal. 57

<sup>17</sup> Lihat Renan dalam Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 8



melihat bangsa sebagai semacam penjelmaan (avatar) modern dari sentimen etnik yang bekerja dalam sejarah.<sup>18</sup>

### 8. Tom Nairn

Di mata Nairn, pewaris sejati historiografi Marxis, nasionalisme merupakan wakil dari kegagalan besar bagi historisisme Marxisme.<sup>19</sup> Marxisme menganggap bahwa nasionalisme merupakan anomali yang tidak mengenakkan bagi teori Marxis dan karenanya disisihkan dan kurang dihadapi sebagai diskursus tersendiri.

Bagi Nairn, nasionalisme adalah<sup>20</sup>

patologi sejarah pembangunan modern, tak bisa dielakkan sama seperti neurosis dalam sesosok pribadi, lengkap dengan kemenduaan assi yang melekat padanya, dengan kemampuan yang sudah inheren padanya untuk anjlok dalam kegilaan, berakar pada dilema-dilema ketidakberdayaan yang disorongkan ke hadapan jagad ini (mirip dengan infantilisme bagi masyarakat-masyarakat) dan pada umumnya tak mungkin disembuhkan.

Kelas menengahlah, bagi Nairn, yang membentuk dan menjalankan nasionalisme. Di sini Nairn tidak dapat menyembunyikan kegeramannya atas peran kaum borjuis dalam melahirkan budaya modern.

### 9. Hugh Seton-Watson

Meskipun tak mendefinisikan nasionalisme secara ketat, penyusun memasukkan Seton-Watson sebagai pakar nasionalisme karena ia berhasil

<sup>18</sup> Lihat Smith dalam Herry Priyono, *Esei-Esei Bentara 2003*, hal. 56

<sup>19</sup> Lihat Nairn dalam Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 4

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 7

menangkap fenomena nasionalisme yang secara esensial sangat menentukan perkembangan nasionalisme secara keseluruhan. Istilah yang digunakan Seton-Watson dalam merujuk pada fenomena tersebut adalah 'nasionalisme resmi'.<sup>21</sup>

Nasionalisme resmi adalah gerakan yang memungkinkan terbentuknya negara modern, prototipenya Eropa Barat yang hanya bisa mungkin jika sebelumnya nasionalisme kebahasaan telah terlebih dahulu muncul. Peranan bahasa dalam perkembangan nasionalisme sangat vital bagi Seton-Watson. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa juga adalah wahana konsolidasi kesadaran. Kesadaran tentang tumbangnyanya Dinasti dan Gereja, kesadaran akan persamaan dan perbedaan dengan 'yang-lain' dan yang tak kalah penting kesadaran tentang 'ruang' dan 'waktu' yang belum terkonsepsi sebelumnya.

Nasionalisme resmi merupakan reaksi oleh kelompok yang berkuasa, terutama namun bukan hanya, kelompok penguasa dinasti dan aristokratis lama yang tengah terancam peminggiran dalam komunitas-komunitas terbayang (*Imagined Communities*) kerakyatan.<sup>22</sup> Nasionalisme tipe ini mengambil bentuk kebijakan dari atas ke bawah berupa kebijakan konservatif bahkan reaksioner dengan tujuan mempertahankan status legitimasi para aristokrat dan bangsawan, mulai dari pembuatan mata uang baru sampai pada wilayah konstitusi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 168

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 168

### C. Konsep Nasionalisme Benedict Anderson Menurut Para Pakar

Vedi R. Hadiz dalam buku politik, budaya dan perubahan sosial (1992) mendefinisikan nasionalisme Ba, dalam kata-kata Ba sendiri, sebagai gejala yang menghidupi suatu bangsa sebagai “suatu komunitas politik yang dibayangkan – dan dibayangkan sekaligus sebagai terbatas maupun berdaulat”. Hadiz kemudian menguraikan definisi tersebut secara singkat, Ia menulis<sup>23</sup>

Dalam penjelasan Anderson, bangsa itu dibayangkan karena anggotanya tidak akan pernah mengenal satu sama lain, tetapi dalam benak tiap anggota itu, hidup suatu bayangan mengenai keterkaitan antara mereka. Selanjutnya, menurut Anderson, bangsa itu dibayangkan sebagai terbatas, karena pasti ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain, dan sebagai berdaulat, karena negara yang berdaulat adalah lambang kebebasan yang diimpikan tiap bangsa. Terakhir, bangsa itu dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena, lepas dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin secara nyata ada, bangsa selalu dibayangkan sebagai persaudaraan yang horizontal dan mendalam.

Dalam kesempatan lain Ben Anderson melihat bahwa bangsa selalu melihat sejumlah nenek moyang yang tak boleh dilupakan dan dikhianati dan keturunan di masa yang akan datang yang nasibnya, bagaimanapun dibayangkan sebagai tanggung jawab mereka yang masih hidup.<sup>24</sup>

Penyusun melihat bahwa langkah pertama yang diambil Hadiz dalam pembahasan tentang *nasionalisme* Benedict Anderson adalah mengurai latar belakang pemikiran dan pendekatan yang digunakan Benedict Anderson.<sup>25</sup> Hadiz melihat bahwa, sebagai seorang Indonesiani yang penuh semangat, Benedict Anderson seringkali menempatkan dirinya dalam polemik, baik dengan para senior

<sup>23</sup> Lihat Hadiz, *Politik, Budaya dan Perubahan Sosial*. Hal. 124-5

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 4-7

dan koleganya yang dituduhnya terlalu memandang penting peranan elit dalam Revolusi Indonesia semisal George McKahin, Benedict Andreson juga menyerang dengan keras tradisi analisis Barat yang menurut Benedict Andreson sangat bias dan etnosentris dalam menggambarkan orang Timur.

Meski sangat hangat secara emosional dengan Kahin, Sjahrir dan PSI yang mendapat porsi besar dalam analisis Kahin mengenai Revolusi Indonesia 1945-1949, bagi Benedict Andreson tak memiliki peranan signifikan, melainkan kaum pemudalah yang terwakili oleh Tan Malaka sebagai fokus kajian Benedict Andreson ketika harus menjawab elemen mana yang begitu mempengaruhi jalannya revolusi Indonesia.<sup>26</sup> Pengemukaan Tan Malaka di atas Sjahrir berasal dari perbedaan tajam oleh Benedict Anderson antara apa yang disebutnya Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial. Menurut Benedict Anderson yang meledak di Indonesia adalah Revolusi Nasional, hasil dari usaha diplomatis dengan motor para elit tetua seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir. Sedangkan revolusi Sosial yang didambakan Benedict Andreson sebagai pecinta Indonesia adalah revolusi yang mengubah keadaan masyarakat, ditempuh dengan jalan pemberontakan, yang dimotori oleh pemuda dengan basis pesantren. Revolusi Nasional merupakan ibu bagi 'Negara' yang memiliki warna status quo yang konservatif, sedangkan revolusi sosial adalah ibu dari semua suara-suara populis progresif. Sjahrir wakil golongan pertama, sedangkan Tan Malaka wakil golongan kedua.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lihat Martin Friffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, hal 346

<sup>27</sup> *Ibid.*

Hadiz dengan cermat mencatat perbedaan karakteristik studi-studi yang dilakukan Benedict Anderson dengan studi-studi dari pendekatan Marxis. Jika pendekatan Marxis menggunakan analisi kelas dalam menjelaskan fenomena sosial, suatu hal yang dimitoskan sebagai objektif, maka Anderson memakai tindakan aktor yang begitu bergantung kepada budaya dan psikologi dari sistem nilai aktor tersebut. Hasilnya, nasionalisme dimata Ben Anderson hanya bisa dipahami jika dihubungkan dengan kemerosotan sistem-sistem budaya besar yang mendahuluinya—dua yang terpenting diantaranya adalah Agama dan Dinasti hirarkis dengan raja yang berwahyu dipuncaknya. Bukanlah kontradiksi kelas yang melahirkan nasionalisme, melainkan merapuhnya Agama dan Dinasti yang memberi tempat bagi nasionalisme.<sup>28</sup>

Selain pendekatan revolusioner progresif, Ben Anderson juga menunjukkan sikap dingin bagi kalangan evolusionis yang diwakili liberalisme, terlihat ketika Benedict Anderson lebih memilih Tan Malaka ketimbang Sjahrir dan PSI-nya.

Apa yang terangkum sejauh ini, menurut Hadiz adalah ciri esensial dari karya-karya awal Benedict Anderson. Ciri tersebut adalah konsistensi Benedict Anderson terhadap pendekatan kultural-emphatis dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini lebih mementingkan tindakan sosial yang tertuang dalam *speech act* berupa monument, sensus, museum, peta, novel, taman makam pahlawan, upacara bendera, film, kaos oblong, nama tempat dan lokasi serta seluruh artefak budaya yang mampu digunakan sebagai medium *speech act* oleh nasionalisme.

---

<sup>28</sup> Lihat Hadiz, *Politik, Budaya dan Perubahan Sosial*. Hal. 126

Hadiz mencatat bahwa *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* adalah karya Ben Anderson yang paling matang sekaligus menjadi penanda gerak gagasannya dengan menyanggah banyak bangunan gagasannya yang terdahulu. *Imagined Communities* adalah prestasi Ben Anderson sebagai globalis, bukan lagi sebagai pakar negara spesifik maupun regionalis, disebabkan tingginya kemampuan eksplanasi yang dimiliki *Imagined Communities* dalam menjelaskan nasionalisme secara universal (lintas budaya politik) dan terverifikasi.

Konsep Ben Anderson yang menyangga teori tentang nasionalisme adalah *print kapitalisme* (kapitalisme-cetak)<sup>29</sup> kapitalisme-cetaklah yang memungkinkan terjadinya dua hal; *pertama*, kesadaran dan konsolidasi pengetahuan tentang ambuknya raja yang berimplikasi pada penemuan teritori baru; surutnya agama kebelakang karena bahasa-kebenaran yang digunakan mengakses kitab suci seperti bahasa Latin, Ibrani, Arab mesti turun tahta dari status bahasa Tuhan dan ilmiah sebagai implikasi dari pembukaan dan pencarian pasar-pasar baru bagi koran, novel serta buku dengan konsumen yang menggunakan bahasa-bahasa ibu/daerah. *Kedua*, kapitalisme-cetak melahirkan novel yang membawa konsepsi baru tentang waktu, apa yang Ben Anderson sebut sebagai 'waktu-hampa yang homogen'. Jika dahulu masyarakat memahami masa kini sebagai hasil masa lalu dan peluang bagi masa depan, 'waktu-hampa yang homogen' telah menawarkan masa lalu, masa kini dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 128

masa mendatang.<sup>30</sup> Dalam novel klasik, tokoh A sekarang adalah kekasih B yang telah melamar D, tanpa perlu minta izin pada D, ayahnya. Alur novel abad pertengahan analog dengan kesadaran nasionalisme. Meski mengandaikan suatu kebersamaan, seorang warga Indonesia Jawa tak akan bertemu, bahkan mungkin tak tahu dengan 'saudara' sebangsanya di Timika. *Print capitalisme* dengan demikian menandai *complete break* (keterputusan total) pemikiran Ben Anderson dari karyanya terdahulu.<sup>31</sup>

Tokoh lain yang membahas nasionalisme Ben Anderson adalah Edward W. Said, terkenal dengan buku *orientalisme* karangannya, memotret Ben Anderson dalam kerangka kerja makro yaitu bagaimana "Barat" memahami setelah terlebih dahulu, menaklukkan, menjinakkan, mengemas, lalu akhirnya menampilkan "Timur", entah dalam narasi resmi berlabel "sejarah" atau dalam narasi tak resmi berlabel "stereotip".<sup>32</sup> Dalam buku *Kebudayaan Dan Kekuasaan; Membongkar Mitos Hegemoni Barat* (1995). Said menempatkan Ben Anderson dalam kelompok yang mendekati kebudayaan sebagai—tidak hanya masalah psikologi, namun juga—aspirasi; modus kesejarahan yang mampu memberi kesadaran pada penganutnya tentang ketertindasan dan kemerdekaan. Artinya, asumsi Barat yang memandang budaya Timur sebagai budaya yang melegitimasi penjajahan dan penindasan adalah asumsi yang tak berdasar, sebab ada budaya Timur yang begitu menghargai kemerdekaan.

<sup>30</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 36

<sup>31</sup> Lihat Hadiz, *Budaya, Politik dan Perubahan Sosial*, hal. 162

<sup>32</sup> Lihat Edward W. Said, *orientalisme*, Pustaka, Bandung; 1996. hal. 1-4

Kolonialisme di mata Said adalah fenomena budaya, bukan hanya fenomena ekonomi-politik. Dalam kata-kata Said sendiri<sup>33</sup> “sebagaimana kebudayaan dapat memengaruhi atau secara aktif mempersiapkan suatu masyarakat untuk menerima dominasi luar negeri dari masyarakat lainnya, ia juga dapat mempersiapkan masyarakat tersebut untuk melepaskan atau mengubah gagasan dari dominasi luar negeri”.

Kesepakatan Said atas Ben Anderson terkait erat dengan konsepsi Ben Anderson tentang bahasa sebagai poros evolusi nasionalisme. Meskipun terkesan lebih luas, kajian Said terkait erat dengan kajian Ben Anderson. Dari perspektif Said, bahasa yang menjadi poros teori nasionalisme Ben Anderson adalah satu dari tiga hal yang mesti dilewati manusia agar dekolonialisasi budaya bisa tercapai, yaitu, *pertama*, bahwa perlawanan bukan sekadar reaksi atas imperialisme melainkan suatu cara alternatif untuk memaknai sejarah manusia, *kedua*, gerakan menjauh dari nasionalisme separatistis menuju suatu pandangan yang lebih integratif komunitas manusia, *ketiga*, desakan untuk mendapatkan hak untuk memandang keseluruhan sejarah komunitas secara koheren dan integral.<sup>34</sup> Ben Anderson memotret gejala ini di Eropa seiring dengan bangkitnya nasionalisme beruna tersebarnya kapitalisme-cetak, yang memberi kepastian bahasa dan menciptakan bidang-bidang bagi pertukaran dan komunikasi di bawah bahasa Latin dan di atas bahasa Ibu/daerah yang digunakan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Lihat Edward W. Said, *Kebudayaan dan Kekuasaan*, Mizan, Bandung; 1995, hal 270

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 290-1

<sup>35</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 57



Di sisi lain, Ben Anderson memandang kolonialisasi juga hanya sebagai satu dari banyak gejala yang menumbuhkan atau tumbuh seiring nasionalisme. Nasionalisme berjaln kelindan dengan kolonialisme dalam membentuk wajah dunia abad XVII-XX. Nasionalisme abad XX adalah nasionalisme yang lahir sebagai reaksi atas kolonialisme, namun adalah salah jika menempatkan kolonialisme sebagai penjelasan satu-satunya bagi nasionalisme abad XX.

Ada satu ciri yang penyusun anggap sama-sama dimiliki baik oleh Said maupun Ben Anderson, yaitu semangat anti pembungkaman sejarah oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Keduanya menaruh perhatian yang amat besar pada proyek pembangunan narasi suatu subjek historis sebagai proyek konstruksi identitas subjek tersebut dalam dimensinya yang paling asali, yanpa harus didikte oleh, meski memang perlu bercermin pada, subjek lain. Semangat tersebut tertuang dalam keengganan keduanya, Said maupun Ben Anderson, untuk memandang Barat maupun bangunan diskursus Barat sebagai pusat kebenaran; tradisi yang dengan arogan mengklaim dirinya mampu lepas dari hasrat subjektif sebagai unsur yang mendistorsi pengetahuan tentang suatu objek, lantas dengan ilusi tersebut menjinakkan yang-lain dengan kategori, untuk akhirnya dibentuk, ditelaah, ditampilkan dan digunakan. Keduanya, Said dan Ben Anderson cenderung menjauhi Barat meski dengan caranya sendiri. Said melakukannya dengan memasuki kesadaran Barat lewat sastra, film dan bahasa, yang digunakannya kemudian untuk membantah klaim legitimasi yang dianut Barat. Menurut Said, klaim ini goyah dan mesti tumbang sebab klaim pengetahuan Barat adalah klaim yang menyalahi dirinya

sendiri; Ia tidak bebas dari hasrat dan karenanya tak mampu objektif, serta tidak universal sebab ia tak mampu didiskusikan diluar batas-batas budayanya sendiri.<sup>36</sup>

Di sisi lain, Ben Anderson membantah analisis Barat dengan cara menempatkan pentingnya perilaku subjek kajiannya pada pusat diskursus yang coba dibangun olehnya. Apa yang disebut pendekatan kultural-emphatic, bagi Ben Anderson adalah jawaban bagi objektivisme Barat yang, bagi Ben Anderson, tak mampu melepaskan dirinya dalam memandang orang atau budaya lain. Jadi, yang dipentingkan oleh Ben Anderson adalah tindakan aktor (psikologi kebudayaan, *speech act*) dari subjek penelitiannya, dengan harapan akan tersarikan narasi subjektif dan bukan metodologi rasional objektivisme Barat yang menempatkan subjek analisis sebagai hal yang terpisah dari peneliti sehingga subjek tersebut bisa diketahui tanpa menghiraukan suara subjek tersebut<sup>37</sup>.

#### **D Kritik terhadap konsep nasionalisme Benedict Anderson**

Penyusun berpendapat bahwa adalah penting mengangkat kritik terhadap Ben Anderson agar menjadi jelas posisi intelektual dan isi serta perkembangan pemikiran Indonesianis masyhur ini. Kritik tersebut datang dari dua penulis berikut.

<sup>36</sup> Lihat Edward W. Said, *Orientalisme*, hal. 4-9

<sup>37</sup> Lihat gambaran menarik dari Ben Anderson ketika membedah pelepasan energi arkeologis colonial di daerah jajahannya dalam *imagined communities*, hal. 274

## 1. Rose Poole

Setelah menguraikan definisi nasionalisme menurut Ben Anderson Poole menyatakan bahwa definisi tersebut tak bisa mengesampingkan distingsi (jarak yang tercipta karena ketidak sesuaiaan) antara komunitas-komunitas yang dalam arti tertentu betul dan komunitas komunitas yang memang palsu. Dalam kata-kata Poole sendiri<sup>38</sup> “nasionalisme, sebagaimana ditunjukkan secara meyakinkan oleh Anderson, adalah sebuah artefak; tetapi nasionalisme secara tenat dialami seakan-akan merupakan bagian dari tatanan kenyataan alamiah. Nasionalisme adalah suatu hal yang kebetulan yang diciptakan oleh keadaan sejarah dan imajinasi kreatif; tetapi nasionalisme dipahami sebagai suatu keniscayaan yang menyatakan dirinya melalui sejarah dan imajinasi”.

Penyusun melihat titik berangkat Poole dalam mengkritik Ben Anderson adalah ketidaksepakatan Poole terhadap dua terminologi dalam definisi nasionalisme Ben Anderson, yaitu; membayangkan dan komunitas. Adalah benar menurut Poole, bahwa imajinasilah yang melahirkan nasionalisme namun nasionalisme bekerja dengan menekan sekuat-kuatnya pengetahuan bahwa dirinya adalah produk imajinasi. Sifat membayangkan dari Ben Anderson di mata Poole dinilai mengaburkan peranan untuk konsep kebenaran dan kepalsuan. Dan akhirnya, menurut Poole, negara kabangsaan adalah komunitas khayal (*imager*) dan bukan sekedar komunitas yang dibayangkan (*imagined*), itu karena negara-bangsa

<sup>38</sup> Lihat Poole, *Moralitas dan Modernitas*, hal. 143

menyanndang peran yang pasti bagi dirinya sendiri untuk tidak membedakan kepalsuan dan ilusi, karenanya negara kebangsaan juga adalah khayal<sup>39</sup>.

Komunitas menurut Ben Anderson juga dipersoalkan oleh Poole. Menurut Poole, komunitas eksis tidak hanya selalu membutuhkan anggota untuk membayangkannya, karena tidak semua masyarakat bisa dikatakan komunitas. Jika tindak 'membayangkan' sudah cukup untuk membentuk komunitas, maka peran yang diambil oleh kesadaran akan terlalu luas. Menurut Poole<sup>40</sup>, "tidak setiap macam masyarakat bisa dikataka sebuah komunitas. Sekurang-kurangnya dalam kondisi yang lebih lanjutlah berbagai anggota komunitas itu ada dalam hubungan-hubungan kesaling tergantungan tertentu satu sama lain dan tak tergantung dari yang lain, mereka sadar akan hal ini, dan kesadaran ini masuk ke dalam perjumpaan mereka satu sama lain dengan cara mendasar dan konstitutif tertentu".

Akhirnya Poole menutup kritiknya atas Ben Anderson dengan menimang-nimang kembali proyek pembentukan identitas dalam nasionalisme, proyek yang melandasi konsep nasionalisme menurut Ben Anderson. Pertimbangan tentang nasib nasionalisme di masa mendatang begitu krusial. Poole menulis<sup>41</sup>:

...negara kebangsaan membayangkan komunitas itu, tidak sebagai sebuah aspirasi menuju sesuatu yang seharusnya ada. Menjelaskan apa itu nasionalisme dan bagaimana paham ini bekerja adalah menghancurkan ilusi yang hakiki untuknya; hal itu melarutkan keniscayaan ke dalam kebetulan, sesuatu yang alamiah ke dalam sesuatu yang bersifat sosial dan jati-diri ke dalam kesamaan. Nasionalisme tak bisa terus bertahan dalam proses ini.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 143

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 144

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 145

## 2. David G. Marr

Marr memandang *Imagined Communities* sebagai karya Ben Anderson yang paling menaruh perhatian terhadap gagasan bahwa keadaan melek huruf berkaitan erat dengan pertumbuhan nasionalisme.<sup>42</sup> Dalam *Imagined Communities*, Ben Anderson melihat bahwa para pegawai administratif kolonial dengan kemampuan bilingualistik (kemampuan berbahasa ganda, bahasa ibu/daerah jajahan serta bahasa kolonial) yang dimilikinya, menumbuhkan nasionalisme karena kebutuhan akan sistem administrasi sebagai efek membesar dan meluasnya pekerjaan negara induk, daerah jajahan dipaksa agar mampu menyediakan tenaga pemuda/i agar dididik menjadi tenaga handal guna menjalankan sistem administrasi kolonial. Pada perkembangannya kemudian, para "peziarah-karir" tersebut menguasai bahasa negara induk di samping menguasai bahasa ibu/daerah, bilingualisme inilah, dalam pemahaman Ben Anderson yang menjadi syarat kunci pertumbuhan nasionalisme anticolonial terutama nagara-nagara Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Karena sadar bahwa posisi mereka tereksplorasi secara ekonomi dan politik (sesuatu yang nyata bahwa secemerlang apapun seorang pribumi pada sistem karir kolonial, ia tak akan pernah mendaki lebih tinggi ke negara induk melainkan tetap berkarir di wilayah jajahan, serta kenyataan bahwa mereka dihisap secara finansial), para "peziarah-karir" mengembangkan kesadaran kebangsaan pada wilayah jajahan. Dan dengan dukungan posisi kelas atas mereka di wilayah jajahan, gerakan

<sup>42</sup> Lihat Marr dalam Hadiz, *Budaya, Politik dan Perubahan Sosial*, hal 129

konsolidasi ide-ide Pencerahan dan liberalisme ke lapisan bawah tak menemui kesulitan.<sup>43</sup>

Di sinilah Marr melihat keganjilan Ben Anderson. Menurut Marr, tidak selayaknya menganggap kecil peran-peran budaya, psikologi, sistem nilai masyarakat pribumi dalam menumbuhkan semangat perlawanan masyarakat wilayah jajahan terhadap negara induk, yang pada gilirannya menjadi sumber-sumber lokal nasionalisme wilayah-wilayah jajahan.<sup>44</sup> Ben Anderson semestinya mampu melihat perbedaan penguasaan bahasa negara induk di satu sisi dengan pengalaman ketertindasan serta penjajahan di sisi lain. Dengan meyakinkan, seorang sarjana marxis, H.B. Davis misalnya, menemukan bahwa para petani di wilayah kekuasaan Vietkong di Vietnam, dengan fasih membicarakan isu-isu sensitif seputar pendidikan, keadilan, dan pemerataan. Lebih jauh, para petani tersebut merasa sebagai wakil sah dari Vietnam yang merdeka.<sup>45</sup>

Satu hal lagi yang ditunjukkan Marr dalam komentarnya tentang *Imagined Communities* adalah tak dihiraukannya kehendak sistemik sebagai sesuatu yang mengoperasikan dirinya sebagai sesuatu yang berada di luar individu, dan sifatnya yang memaksa individu untuk mematuhi. Dalam kata-kata Marr<sup>46</sup> "Orang mematuhi hukum nasional, membayar pajak nasional, pergi berperang dan mati untuk bangsa, sebagian besar karena mereka dikelilingi oleh struktur-struktur pendidikan, administratif dan keagamaan yang dirancang untuk memprogram dan

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 134

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hal 136

mendorong mereka untuk melakukan itu...sistem akan berfungsi lepas dari apa yang menjadi pikiran masing-masing warga negara”.

Jika melihat pendekatan kultural-emphatis yang dianut Ben Anderson, maka pengabaianya terhadap hal-hal objektif yang beroperasi dalam masyarakat bisa dimengerti. Ben Anderson lebih menekankan penjelasan yang lahir dari pendekatannya lebih kepada unsur-unsur narasi subjektif yang beroperasi dalam masyarakat.<sup>47</sup> Mengingat bahwa *Imagined Communities* ditulis dalam semangat untuk menandingi narasi nasionalisme dalam tradisi Marxis maupun Liberalis<sup>48</sup>, menambahi alasan mengapa Ben Anderson melakukan pengabaian seperti itu.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 137

<sup>48</sup> Ben Anderson, *imagined communities*, hal. 5

## BAB III

### PANDANGAN UMUM

#### A. Biografi Singkat Benedict Anderson

Benedict Richard O'Gorman Anderson lebih dikenal sebagai Ben Anderson lahir pada tahun 1936 dalam sebuah situasi yang terlihat unik. Situasi yang menurut penyusun begitu berpengaruh dalam membentuk alur gagasan Ben Anderson yang dipenuhi kesan menyanggah tradisi pemikiran dominan serta begitu kosmopolit, tidak tunduk pada satu mazhab pemikiran tertentu.

Lahir di Kunming, sebuah kota di Cina, ber-Kartu Tanda Penduduk Irlandia, mempelajari sastra Eropa klasik, kuliah di universitas Cornell Amerika Serikat, dan pakar nasionalisme dengan penguasaan bahasa dan sejarah kebudayaan dunia terutama Asia Tenggara yang mengagumkan, seorang Indonesianis luar dalam, adalah garis besar perjalanan hidup pemikir sekaligus aktivis ini. Namun, mengingat individu tak bisa dirangkum oleh individu lain, apalagi hanya dalam satu dua halaman, maka adalah sebuah kemestian jika "sejarah" hidup Ben Anderson sedikit penyusun kaji, sekadar upaya untuk lebih dekat dengan pribadinya.

Bapak Ben Anderson dilahirkan di Penang, tempat bapaknya, kakek Ben Anderson ditempatkan oleh kerajaan Inggris pada sebuah pasukan kerajaan. Kakek Ben Anderson yang pejabat kerajaan, dalam kata-kata Ben Anderson sendiri<sup>1</sup>, "agak kecewa terhadap putranya yang gagal lulus dalam ujian masuk Universitas Cambridge". Hal ini berbuntut perginya sang bapak ke Cina,

<sup>1</sup> lihat Ben Anderson, *Kunasa-Kota*, hal 4



bergabung dengan Pabean Kelautan Kerajaan (*imperium maritime custom*), entah untuk bertualang atau untuk kepentingan lain.

Hampir tiga dasawarsa bekerja di Cina menjadikan bapak Ben Anderson fasih berbahasa Cina sekaligus pecinta Cina yang mampu menirukan banyak gerakan khas Cina secara lucu.<sup>2</sup> Inilah alasan mengapa Ben Anderson dilahirkan di Cina. Ben Anderson tumbuh “sebagai” orang Cina (lahir di rumah yang dipenuhi perabot Cina dan kebiasaan makan Cina) yang membedakannya dengan tetangga-tetangga Irlandia yang sebaya dengannya.

Ben Anderson mengingat<sup>3</sup> bahwa kedekatan emosionalnya dengan Asia, selain karena hal-hal diatas, juga dipengaruhi dengan diasuhnya Ben Anderson kecil oleh Ti Hai, gadis muda Vietnam yang telah membebaskan diri dari jalur kereta api pengunungan yang spektakuler hingga ke Hanoi melalui Lan San hingga ke Kunming. Album-album foto keluarga Ben Anderson banyak diisi oleh kenangan dari masa Vietnam kolonial serta Cina zaman Chiang Kai Sek.

Lebih jauh, garis keturunan Ben Anderson dari ibunya yang Inggris kebanyakan adalah pebisnis konvensional, hakim dan polisi, serta memiliki seorang paman dengan yang lain karena berani bertualang ke Asia Tengah, bahkan menulis sebuah buku tentang subjek tersebut. Pada garis keturunan ibu, bagaimanapun menurut Ben Anderson, lebih unik dan aneh, yang berasal dari darah campuran Inggris-Irlandia. Keluarga ibunya, keluarga besar O’Gorman telah lama aktif dalam politik nasional.<sup>4</sup> Kakek-paman dari ibu Ben Anderson telah dipenjara karena bergabung dengan gerakan pemberontakan Irlandia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Bersatu pada 1798. kakek ibu Ben Anderson telah bergabung dan kemudian menjadi sekretaris asosiasi katolik pimpinan Daniel o'Connel yang memperjuangkan emansipasi katolik. Salah satu sepupunya menjadi anggota fanatik kelompok Charless Parnell yang terdiri atas anggota parlemen yang berhaluan nasionalisme Irlandia di Westminster. Karena semua inilah, menurut Ben Anderson, sulit baginya membayangkan dirinya sebagai orang Inggris, meskipun telah dididik di negeri itu sejak usia 11 tahun.

Pada tahun 1941, melihat gejala perang pasifik akan segera meledak, sang ayah yang sakit-sakitan memutuskan untuk memboyong pulang keluarganya dari Cina melalui Amerika Serikat. Peristiwa Pearl Harbour dan Armada Perang Bawah Laut Atlantik telah menunda rencana kepulangan sang ayah selama empat tahun. Ayah Ben Anderson berhasil memperoleh pekerjaan sebagai penerjemah bahasa Cina pada dinas rahasia Inggris dan keluarga Ben Anderson melewati tahun-tahun peperangan di California dan Denver, tempat bagi Ben Anderson menjalani pendidikan formalnya yang pertama. Di sanalah, menurut Ben Anderson dimulai serangkaian keterasingan— sebagai orang beraksen Inggris di sekolah Amerika, belakangan orang beraksen Amerika di sekolah Irlandia, orang Irlandia di sekolah Inggris— yang menjadikan bahasa bagi Ben Anderson sebagai sesuatu yang problematik secara menguntungkan. Menguntungkan bukan saja oleh hal-hal tersebut menjadikan Ben Anderson pribadi yang menampung banyak anasir dalam dirinya, namun hal-hal tersebut menjadikan dirinya mampu membaca simpul-simpul budaya yang kadang sulit ditelusuri, sehingga bagi Ben Anderson kepekaan adalah hal yang niscaya dalam membaca budaya lain maupun ketika menuliskan budaya tersebut sebagai "sejarah". Kemampuan yang

dimiliki oleh Ben Anderson sebagai pakar disebabkan oleh lingkungan yang begitu kondusif. Setelah belajar historiografi dibawah asuhan Eric J. Hobsbawn, pakar kawasan Eropa dan Balkan, Ben Anderson melanjutkan minatnya menuju studi Indonesia dan Asia Tenggara dengan bimbingan George McTurnin Kahin pengarang "*Nationalism and Revolution In Indonesia*", Indonesianis masyhur yang dikenal sebagai pendiri kajian-kajian Indonesia di universitas Cornell.

Bersama kolega-koleganya, Ben Anderson meneliti, mengarsipkan, mengembangkan, mengunjungi dan pada akhirnya mencintai Indonesia. Kecintaan pada unsur-unsur budaya Jawa yang dianggapnya egaliter dan humanis menjadikan karya-karya Ben Anderson mengenai politik, kebudayaan dan bahasa Indonesia begitu banyak memuat kecenderungan Ben Anderson untuk mengkaji Indonesia dengan perspektif yang dibangun oleh subjek penelitiannya, bukannya dengan meminjam analisis Barat yang bagi Ben Anderson, tak mampu melepaskan dirinya dari etnosentrisme.

Publik Indonesia secara luas mengenal Ben Anderson ketika pada tahun 1966-1970 presiden yang berkuasa waktu itu, Soeharto, melarang Ben Anderson masuk ke Indonesia. Peristiwa ini bermula dari kegiatan Ben Anderson bersama kolega-koleganya yang tergabung dalam "*Indonesian Project*" universitas Cornell, menyusun karya tulis dengan judul "*Cornell Paper*", di mana sang presiden, dengan cukup meyakinkan dikritik secara terbuka mengenai sejarah, baik peristiwa kelam 1965-66 maupun kebijakan-kebijakan pak Harto dan rezimnya banyak memuat aksi-aksi kekerasan. Dengan *Cornell Paper*, legitimasi intelektual kekuasaan militer Orde Baru menghadapi gangguan serius.

Pencekalan adalah hal wajar sebagai buntutnya.<sup>5</sup> Meski dicekal, Ben Anderson masih sempat pandang ke negeri yang dicintainya itu, setidaknya tiga kali sebelum tahun 1975.

*Imagined Communities* mengubah Ben Anderson dari pakar negara dan kawasan menjadi sarjana kosmopolit. Terbit pada tahun 1983 *Imagined Communities* langsung mengobarkan perdebatan seputar `isme` yang dikenal sebagai `isme` yang kekurangan sarjana handal untuk mem bahas nya. Entah pro atau kontra terhadap *Imagined Communities*, karya traktat tersebut berhasil mengangkat pamor nasionalisme sebagai diskursus yang tetap relevan dibicarakan. Publik jadi sadar setelah *Imagined Communities* menyajikan dirinya dengan humor satir dan metode reflektif, bahwa nasionalisme, berikut posisi, asal-usul, berikut masa depannya, merupakan diskursus termahal, bukan saja karena para nasionalis dalam jumlah yang kolosal rela membunuh manusia lain karena rasa kebangsaan, namun juga rela membawa dirinya dalam perseteruan berdarah yang dipicu nasionalisme<sup>6</sup>

## B. Nasionalisme Menurut Benedict Anderson

### 1. Defenisi Nasionalisme

Dalam *Imagined Communities; Reflection On The Origin and Spreat Of Nationalism*, Ben Anderson mendefenisikan nasionalisme sebagai kesadaran dan gerakan yang melandasi, menjaga dan memberi tujuan suatu nasion. Dan nasion sendiri di defenisikan sebagai "komunitas politis dan dibayangkan sebagai

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 15

<sup>6</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*. Hal. 11

sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan". Apa yang memberi warna khusus pada defenisi nasionalisme Ben Anderson adalah pengangkatan unsur penyedia makna bagi identitas diri yang dilakukan nasionalisme serta menempatkan nasionalisme sebagai proyek masyarakat penganutnya dan bukanlah fenomena derivatif (turunan) dari fenomena lain seperti perkembangan industri, ilmu pengetahuan dan manajemen masyarakat kapitalis.

Nasionalisme bagi Ben Anderson adalah proyek perumusan identitas diri oleh anggotanya, sebab bingkai-bingkai makna bagi identitas yang selama ini dipegang oleh Agama dan Dinasti perlahan-lahan mengalami pengeroposan sehingga kolektifitas butuh pemaknaan baru agar mampu menjelaskan dirinya kepada audiensnya.

Meski memikat, defenisi nasionalisme Ben Anderson tak luput dari kritik. Penyusun menampilkan dua kritik dari Rose Poole dan Partha Chatterjee dalam buku *Moralitas dan Modernitas* (1992). Poole secara filosofis-analisis menyatakan bahwa nasionalisme dianut oleh nasion bukan sebagai komunitas terbayang (*Immagined*) namun komunitas khayal (*imaginer*). Poole menelaah bahwa memang benar bahwa ada komunitas-kounitas palsu, namun kita semestinya tak menutup mata pada kenyataan bahwa memang ada komunitas-komunitas dalam arti betul. Nasionalisme mengoperasikan dirinya dengan menekan pengetahuan bahwa ia adalah hasil penemuan imajinasi, contohnya, meskipun nasionalisme adalah produk modernitas namun ia melukiskan dirinya sebagai sesuatu yang abadi. Nasionalisme memberi kerangka pada negara-bangsa

sebagai komunitas khayal karena perannya yang pasti dalam menciptakan kepalsuan ilusi dalam pengenalannya.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Poole juga menyanggah asumsi bahwa “membayangkan” (*to imagine*) sudah cukup bagi kolektifitas untuk menciptakan komunitas. Tidak setiap macam masyarakat bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas. Proses “membayangkan” yang dengan sendirinya menciptakan komunitas mendorong batas kesadaran keluar dari bingkainya. Pada awalnya, yang ada adalah ikatan-ikatan primordial seperti keluarga, baru pada masa-masa selanjutnyalah ketika anggota-anggota komunitas itu menemukan dirinya dalam situasi saling ketergantungan yang diterjemahkan dalam bentuk kesadaran untuk menginstitusi pertemuan mereka dalam bentuk-bentuk tertentu. Serangan Poole tidak berhenti di situ saja. Asumsi Ben Anderson bahwa nasionalisme memberi audiensnya rujukan nilai bagi konstruksi identitas juga dikritik oleh Poole. Poole sepakat bahwa nasionalisme memberi jawaban-jawaban yang tak diberikan oleh modernitas yang telah menghancurkan komunitas, namun cara kerja nasionalisme dalam menyediakan kerangka makna tersebut adalah dengan mengasumsikan konstruksi identitas tertentu bukan sebagai sesuatu yang seharusnya ada namun sebagai sesuatu yang sudah ada, bahkan kadang kala berakar pada momen-momen simbolis yang memiliki jarak waktu begitu jauh ke belakang.

Chatterjee mengeluarkan kritik yang agak berbeda dari Poole. Chatterjee menuduh Ben Anderson gagal memahami bahwa nasionalisme anti kolonial bukanlah tiruan model-model pergerakan yang diciptakan Eropa dan Amerika

<sup>7</sup> Lihat Rose Poole, *Maralitas dan Modernitas*, hal. 141-2

Serikat. Nasionalisme anti kolonial sebagian besar memiliki akar yang tertancap dalam pada budaya setempat. Chatterjee menggolongkan Ben Anderson ke dalam seratus sarjana Barat yang menyalahkan negara kolonial atas status keterjajahan yang disandangnya. Chatterjee menulis<sup>8</sup> "Eropa dan Amerika, satu-satunya 'pelaku sejarah' telah mempertimbangkan atas nama kita naskah Pencerahan dan eksploitasi kolonial, tetapi juga resistensi anti kolonial kita dan kesengsaraan pasca kolonial, bahkan imajinasi kita pun harus tetap dijajah."

Lebih lanjut, Chatterjee menyarankan agar perbedaan bidang material dan bidang spiritual dari struktur sosial dalam memahami nasionalisme anti kolonial di India dan beberapa bagian Afrika bisa diperjelas. Dalam bidang material, masyarakat memang terjajah oleh bentuk-bentuk nasionalisme yang dianalisis Ben Anderson yang tujuan akhirnya untuk menciptakan masyarakat industrial. Namun dalam bidang spiritual, masyarakat tetap otonom dalam memelihara kultur dan bahasa mereka. Senada dengan isyarat Edward W. Said dalam buku *Kebudayaan dan Kekuasaan* (1995), bahwa terdapat kebudayaan yang membantu mengundang atau menciptakan imperialisme, sebagaimana juga terdapat kebudayaan yang menolak ras imperialisme dan menyediakan basis material dan spiritual untuk melawan imperialisme.

## 2. Asal-Usul Nasionalisme

Dalam menjelaskan asal-usul nasionalisme, Ben Anderson mengaitkannya dengan fenomena mulai runtuhnya komunitas yang ditopang oleh agama dan

<sup>8</sup> Lihat Chatterjee dalam Martin Griffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, hal 351

dinasti hierarki dengan raja yang berada dipuncak hierarki tersebut, serta bergesernya pemahaman tentang waktu. Komunitas religius mengalami kemunduran dalam menyediakan makna bagi kolektivitas disebabkan oleh tergesernya posisi bahasa sakral dan kitab suci agama-agama besar. bahasa Latin, Arab klasik serta bahasa Mandarin, tergeser oleh munculnya bahasa-bahasa daerah / ibu yang dikodefikasi oleh kapitalisme cetak, sebagai efek inheren dari terbatasnya pasar yang disediakan oleh konsumen berbahasa Latin, Arab Klasik serta Mandarin. Bahasa ibu / daerah yang telah tercetak merupakan elemen vital dalam teori nasionalisme Ben Anderson. Pembayangan sebuah komunitas hanya dimungkinkan dengan terciptanya sebuah ruang bersama yang mengeksklusifikasi calon anggotanya, ruang tersebut disediakan oleh buku, koran, famflet, nama toko serta tempat dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tak mengerti huruf-huruf tersebut lantas menginisiasi kesadaran bahwa buku ini, koran ini hanya dibaca oleh segelintir orang; cikal bakal suatu nasion.

Ranah dinasti hirearkis memiliki akhir yang agak berbeda. Setelah bahasa Latin sebagai bahasa kebenaran dan legitimasi runtuh, nasionalisme kerakyatan yang berlandaskan kebahasaan muncul sebagai efek terciptanya "kami" yang disediakan oleh bacaan. Para pewaris dinasti besar seperti Dinasti Jakri di Thailand serta Dinasti Romanov di Rusia, menggalakkan apa yang disebut oleh Ben Anderson sebagai "Russifikasi"; karena terancam akan dipinggirkan dari dan disaingi oleh nasionalisme kerakyatan/kebahasaan, maka dinasti-dinasti tua menurunkan sifat kebijakannya untuk lebih populis, menyandarkan legitimasi kontrolnya pada nasionalitas linguistik tadi, serta menginisiasi dirinya sebagai nasional, sehingga lahirlah apa yang disebut Ben Anderson, meminjam istilah



Seton-Watson, nasionalisme resmi, prototipe nagara modern. Tipe nasionalisme ini adalah reaksi konservatif dari aristokrat dinasti untuk tetap eksis dalam posisinya sebagai legalisator nasional.

Faktor ketiga yang melancarkan pembayangan nasional adalah perubahan cara konsepsi terhadap waktu. Pada awalnya sejarah dan kosmologi terjalin erat dan susah dipisahkan. Waktu dipahami sebagai garis linear yang berujung pada Hari Pembalasan. Masa kini adalah akibat dari masa lalu serta potensi bagi masa depan. Ini berubah dengan datangnya novel, setidaknya novel klasik, dan koran.

Pada novel, pembaca bertindak sebagai konsumen waktu yang tak berdimensi yang dialami oleh tokoh cerita; A yang merupakan suami B, sedang mengunjungi C, gundiknya yang sebelum kedatangan A, dikunjungi terlebih dahulu oleh D, pacarnya. Waktu yang terpampang dihadapan pembaca adalah sejarah, yang tidak lagi berkaitan dengan kosmologi. Waktu yang disajikan oleh novel adalah, apa yang disebut Ben Anderson, "waktu hampa nan homogen" dimana pembaca mampu mempersepsi seluruh dimensi waktu tokoh cerita secara bersamaan. Novel Klasik analog dengan kesadaran nasional; A dan D mungkin tak akan bertemu atau bahkan tak akan saling kenal, begitu pula bangsa sebagai komunitas merupakan entitas sosiologis yang menuruni atau mendaki waktu secara "hampa nan homogen", sebab seseorang di Bandung tak akan kenal, mungkin tak akan bertemu dengan orang lain di Bulukumba, namun terikat bersama oleh suatu identitas nasional yang menyerupai plot cerita dalam novel.

Jika novel klasik menyediakan inisiasi bagi pemahaman terhadap "waktu hampa nan homogen", maka koran menyediakan alat ukurnya; kalender. Sebuah ruang kecil di sudut kanan/kiri koran, yang memberitakan "waktu" sebagai "hari

ini" berupa catatan kalendris, maka entitas sosiologis tadi yang dibayangkan sebagai bangsa menemukan riwayatnya; kapan ia lahir, hari-hari apa saja yang diperingati sebagai hari-hari besar nasional, dan, ini yang paling penting, siapa anggotanya. Seseorang yang mendapati dirinya sedang membaca harian pagi akan menemukan dirinya membaca sesuatu yang juga dikonsumsi oleh tetangganya, sahabat kecilnya nun jauh di sana, lalu pembayangan "kita" mulai beroperasi. Menurut Ben Anderson, koran adalah buku sehari yang menolak dirinya abadi. Ciri koran yang paling menonjol adalah ketergantungannya pada pembaruan terus menerus. Maka pembaca pun secara terus menerus menginisiasi siapa "kita" tadi.

### 3. Tahapan Perkembangan Nasionalisme

Ben Anderson, secara linear, membagi perkembangan nasionalisme kedalam empat gelombang. *Pertama*, adalah apa yang telah penyusun uraikan sebagai nasionalisme kerakyatan yang berlandaskan kebahasaan. *Kedua*, adalah nasionalisme resmi yang digalakkan aristokrasi dinasti yang terancam tergusur dari kekuasaan oleh nasionalisme kerakyatan/kebahasaan. Yang *ketiga* adalah nasionalisme anti kolonial. Nasionalisme tipe ini merupakan respon dengan skala nasional terhadap kolonialisme. Nasionalisme anti kolonial banyak dijumpai pada negara-negara Asia dan Afrika pada Akhir abad IX dan Abad XX. Menurut Ben Anderson, nasionalisme anti kolonial mengoperasikan dirinya dengan menyerap aspek populis dari nasionalisme kerakyatan/kebahasaan, dan menyerap orientasi formal kelembagaan nasionalisme resmi. Dengan pembahasan ini, Ben Anderson bermaksud menggugurkan asumsi bahwa negara

merdeka lahir karena pembayangan-pembayangan yang bersifat mandiri dari negara kolonialnya. Ben Anderson menegaskan bahwa akar-akar pembayangan “kita” secara nasional merupakan hasil dialog dengan negara kolonial. Salah satu bukti populer yang diajukan oleh Ben Anderson dalam mendukung asumsinya adalah pembacaannya terhadap evolusi peta; batas-batas teritorial negara merdeka merupakan warisan dari negara kolonialnya, ini merupakan aspek vital yang melahirkan dan menjaga pembayangan “kita” sehingga begitu penjajah pergi, “kita” langsung mampu menemukan penanda klaim kesahihan atas ruang sosial tertentu beserta manusia penghuninya.

Pada titik inilah, Ben Anderson menerima kritik dari dua penulis ternama, Edward W. Said dan Partha Chatterjee. Said mengkritik Ben Anderson karena memandang linear perkembangan pelebagaan nasionalisme. Ben Anderson memahami perkembangan nasionalisme secara simultan dari bentuk dinasti, lalu standarisasi kelembagaan yang menjadi ciri nasionalisme resmi, untuk kemudian menjadi lembaga negara modern dengan kedaulatan sebagai basis legitimasinya. Kritik kedua datang dari Chatterjee. Penulis asal India ini menegaskan bahwa Ben Anderson terjebak dalam cara berpikir Barat yang hanya memandang sah dirinya sembari menganggap enteng selainnya. Ini bahkan berimbas pada pembacaan asal-usul nasionalisme anti kolonial yang, bagi Chatterjee, bukanlah semata hasil pembayangan “Barat” terhadap jajahannya, namun lebih merupakan reaksi murni budaya Timur” yang, setidaknya sebagian, menghargai perikeadilan dan perikemanusiaan. Budaya, memang bisa melegitimasi penjajahan, namun budaya jualah yang menyediakan legitimasi bagi perlawanan anti kolonial.

Gelombang nasionalisme *keempat* adalah gelombang nasionalisme jarak jauh (*long distance nationalism*) yang merupakan pembacaan mutakhir Ben Anderson terhadap perkembangan nasionalisme yang bermula sebagai jawaban Ben Anderson terhadap pertanyaan bagaimana revolusi komunikasi dan transportasi abad XX menyediakan bentuk-bentuk komunitas baru dengan basis kebangsaan.<sup>9</sup> Ben Anderson melihat nasionalisme jarak jauh adalah tipe nasionalisme yang dirumuskan oleh Ernest Gellner sebagai kesadaran yang timbul sebagai efek dari masyarakat industri tingkat lanjut dalam menata manajemen kolektifitas berbasis sistem kapitalisme lanjut. Namun, Ben Anderson menambahkan bahwa definisi Gellner tentang nasionalisme mesti dibaca dalam konteks "pembuangan" barulah definisi nasionalisme jarak jauh bisa dirumuskan.

Elemen utama dalam penjelasan Ben Anderson tentang nasionalisme jarak jauh adalah migrasi. Pada akhir abad XVIII sampai awal abad XX, migrasi dimaknai sebagai gerak manusia keluar ke arah tempat-tempat baru dengan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih rendah dari tempat asalnya. Migrasi tipe awal ini tercermin dengan baik pada kasus pembuangan manusia-manusia calon anggota tiga belas koloni keluar dari Eropa menuju Dunia Baru. Migrasi dewasa ini bergerak ke arah sebaliknya, manusia datang ke pusat-pusat industri melalui jenjang pendidikan untuk menjadi tenaga kerja dalam manajemen modern yang dikembangkan kota-kota pasca industri.

Maka dengan segera tercipta semacam keterasingan yang melanda para pekerja Indonesia misalnya terhadap kampung halamannya karena harus bekerja

<sup>9</sup> Lihat Cirifliths, *LimaPuluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, hal. 351

di New York sebagai tenaga pengajar. Situasi ini memberi nasionalisme jarak jauh tiga kekuatan politis, yaitu; *pertama*, nasionalisme jarak jauh merupakan produk transformasi kapitalisme dengan kacamata yang tinggi dan daya jangkauan luas. *Kedua*, nasionalisme jarak jauh menciptakan sebuah politik dengan gaya serius namun secara bersamaan bersifat cair sehingga sulit diprediksi. Contoh nyata dari kekuatan politik tersebut adalah terhempasnya India ke dalam krisis terbesar di luar krisis Partisi. Krisis ini bermula dari penghancuran masjid Babri di Ayodha yang dilakukan oleh *Vishwa Hindu Parishad* (Dewan Hindu Dunia) yang mendapat sokongan dana dari para pendukungnya yang tinggal di Amerika Utara dan Inggris. Contoh kedua adalah berhasil dilangsungkannya kampanye calon presiden Kamboja, Kim Kethavy, pemilik paspor Amerika Serikat. Meskipun tak berhasil terpilih menjadi presiden Kamboja, setidaknya aksi Kethavy mendapat perhatian dari perumus kebijakan kependudukan Amerika Serikat. Di sini, Ben Anderson memperingatkan bahwa nasionalisme jarak jauh tidak mesti selalu diwarnai oleh bentuk-bentuk gerakan politik ekstrim. Ada orang-orang Filipina dalam jumlah yang besar di luar Filipina yang memberikan kontribusi dalam menggulingkan Marcos, bahkan ekonomi Filipina dewasa ini banyak bergantung dari devisa yang dikirimkan dari Saudi Arabia, Inggris, Hongkong, Jepang, Spanyol, Italia serta Amerika Serikat. *Ketiga*, gerakan politik nasionalisme jarak jauh dilakukan dengan kesengajaan penuh yang berakar pada kesadaran bahwa pembuangan yang dialami aktor-aktor nasionalisme jarak jauh adalah pilihan sendiri. Konsep nasionalisme jarak jauh merupakan salah satu sumbangsih orisinal Ben Anderson terhadap studi Hubungan Internasional kontemporer.

### C. Relevansi Pembahasan Nasionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer

Rencana awal untuk menulis *Imagined Communities* lahir dari pengamatan Ben Anderson terhadap fenomena perang antar negara penganut komunisme-sosialisme di wilayah Asia Tenggara. Perang segitiga Vietnam-Kamboja-China yang meledak pada tahun 1977 menghadirkan pertanyaan bagi Ben Anderson; "mengapa tiga negara dengan afiliasi ideologi politik yang relatif sama terjebak dalam perang saudara yang ganas?"<sup>10</sup> pertanyaan ini mengantarkan Ben Anderson meneliti fenomena nasionalisme dengan serius.

Jika diteliti, perang antar negara Marxis-Leninis tidak hanya perang segitiga Vietnam-Kamboja-Tiongkok, sebab pada tahun 1969 pecah bentrokan bersenjata antara Cina dan Uni Soviet yang bermuara pada sengketa perbatasan, juga tak bisa dilupakan intervensi militer Soviet ke Jerman pada tahun 1963, Hungaria pada tahun 1956, Cekoslowakia pada tahun 1968, dan Afganistan pada tahun 1980.<sup>11</sup>

Namun relevansi nasionalisme dalam studi Hubungan Internasional tidak melulu terkait dengan asumsi tatanan anarkis khas paradigma realisme yang terungkap oleh fenomena perang antar negara. Kebutuhan studi Hubungan Internasional akan kejelasan nasionalisme hari ini, selain karena nasionalisme merupakan syarat perlu bagi integrasi dua negara dan disintegrasi yang memecah sebuah negara, juga karena nasionalisme merupakan konsep kunci untuk memetakan "ketegangan antara aktivitas merekonsiliasi prinsip kedaulatan

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>11</sup> *Ibid.*

negara (yang melindungi batas teritorial yang ada) dengan prinsip *self determination* bagi rakyat (yang secara konstan mengancam untuk meredistribusikan batas-batas menjadi sesuatu yang samar)".

Fenomena ketegangan ini merupakan titik simpul di mana nasionalisme berakar. Negara memakai nasionalisme sebagai basis nilai yang menyediakan legitimasi untuk mengontrol dan menyiapkan ketertiban bagi rakyatnya, sedangkan kesadaran rakyat yang semakin berkembang, bukan hanya karena Pencerahan dan Aufklarung, namun juga karena teknologi informasi menyediakan rujukan identitas yang hampir tak terhingga jumlahnya bagi rakyat untuk menyandarkan nilainya, sebagai efek pertemuan budaya yang dilangsungkan secara semakin instan dan kreatif oleh teknologi informasi tadi, mengembangkan atau lebih tepatnya memakai secara kreatif nasionalisme untuk mencari sandaran nilai-nilai baru yang tidak disediakan oleh negara. Maka batas-batas teritorial—hal yang sangat tabu dalam negara menjadi samara di mata rakyat.

Contoh tak terbantahkan atas asumsi di atas adalah kebangkitan global nasionalisme religius dan integrasi Eropa dengan aktivitas konsolidasi yang sangat intens. Mark Jurgensmayer dalam buku *Nasionalisme Religius* (1998) mengungkapkan bahwa perkembangan politik internasional sering diwarnai kekerasan antar kelompok agama. Ketegangan antara penganut Hindu, Sikh dan Islam di India, konflik kaum Sinhala dan Buddha di Sri Lanka, gesekan antara kaum Muslim dan Yahudi di Palestina, revolusi kaum Sikh di Punjab, bangkitnya revolusi Islam di Tajikistan, konflik Inggris dan Irlandia dengan warna religius dan serangkaian aksi-aksi politik-ekonomi yang lain di banyak belahan dunia,

membuat Jurgensmayer berkesimpulan bahwa nasionalisme sekuler tengah menghadapi kritik dan tantangan serius dari nasionalisme religius dengan tatanan nilai dan orientasi budaya yang secara radikal berbeda dengan sekularisme modern.

Integrasi Eropa Barat pun menyajikan sejumlah gagasan dalam bentuk pertanyaan yang mesti dijawab oleh studi Hubungan Internasional; apa peran nasionalisme dalam integrasi tersebut, akankah integrasi tersebut akan tetap didukung oleh nasionalisme masing-masing negara atau malah dihadang olehnya?, apa dan bagaimana reaksi nasionalis di masing-masing negara tersebut?, benarkah integrasi tersebut akan menyudahi riwayat nasionalisme atau malah mengukuhkannya setelah tujuan-tujuan pragmatis dan instrumentalis tercapai?

Demikianlah, pembahasan nasionalisme masih tetap relevan dalam studi Hubungan Internasional, bukan hanya menyangkut tatanan internasional melainkan pemetaan akan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melihat interaksi sebagai pembentuk dan pengatur tatanan internasional dalam artinya yang paling longgar.

Namun, pembahasan nasionalisme semestinya dilakukan dengan pendekatan non-instrumentalis. Selain sebagai penyeimbang penjelasan instrumentalis (penjelasan yang menekankan fungsi, kegunaan, akibat yang akan timbul dari suatu fenomena), penjelasan dengan karakter non-instrumentalis akan mendekati dan membuka konsep nasionalisme sebagai kesadaran, aspirasi bahkan mungkin ideologi, yang tak disediakan penjelasan instrumentalis.



Tak ada yang mampu menghindar dari pengakuan bahwa penjelasan instrumentalis yang dipelopori paradigma realisme, liberalisme dan kritis telah mampu menempatkan nasionalisme sebagai faktor penting dalam interaksi dan tatanan internasional. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa studi Hubungan Internasional mesti mampu membuka kemungkinan-kemungkinan baru agar daya analisa dan kritisisme meningkat. Dengan diajukannya dua contoh perkembangan nasionalisme (integrasi Eropa dan nasionalisme religius), nasionalisme sudah selayaknya dikaji sebagai subjek kajian yang terpusat bukan sebagai salah satu penjelasan instrumentalis yang diarahkan pada penjelasan skala makro yang koheren, atau diklaim koheren.

Selain nasionalisme religius dan integrasi Eropa, penyusun menganggap studi Hubungan Internasional mesti lebih memberi ruang bagi wacana poskolonial. Poskolonial diinisiasi oleh buku *Orientalisme* karangan Edward W. Said. Dengan menata ulang konsep "*power/knowledge*" dari Foucault (filsuf Prancis yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan terjalin erat, saling mereproduksi satu sama lain, saling mensahihkan satu sama lain dan akhirnya saling melegitimasi satu sama lain), Said menatap perjalanan budaya sebagai jejak poskolonial; kesadaran masyarakat terjajah telah dibentuk oleh penjajahnya sedemikian rupa sehingga sangat sukar menatap dirinya sebagai subjek historis yang otonom, melainkan selalu mengidentikkan diri dengan penjajahnya agar tetap eksis, dengan corak dan gradasi imitasi yang beragam.

Fenomena poskolonial merentang dari Afrika, Asia, Amerika Selatan, Eropa Timur bahkan Eropa Barat tak bisa benar-benar mampu melepaskan diri dari ingatan keterjajahannya.

Jika orientalisme adalah cara Barat memandang Timur sebagai yang eksotik, primitif, animis, mesti ditaklukkan, sumber bahan baku, peluang pasar dan konsumen budaya Barat, maka oksidentalisme (dipelopori pemikir asal Mesir, Hasan Hanafi) adalah cara pandang Timur terhadap Barat yang dimaksudkan sebagai *counter* terhadap orientalisme. Oksidentalisme melandaskan dirinya pada perlunya Timur memandang dirinya sebagai subjek historis otonom untuk selanjutnya mampu menulis sejarahnya sendiri dan tidak tergantung citra dari manapun saat mendefinisikan dirinya sendiri—*counter* dengan aspirasi politis yang terlihat jelas dan studi Hubungan Internasional masih meraba dalam remang wacana poskolonial sampai hari ini.

Wacana poskolonial dan nasionalisme terkait erat. Cara Barat dan Timur dalam aktivitas dipandang dan memandang melibatkan nasionalisme. Meski nasionalisme yang terlibat adalah nasionalisme dalam semua artinya, termasuk nasionalisme etnis dan religius.

Ada klaim bahwa nasionalisme adalah reaksi atas kolonialisme. Ini benar, hanya jika yang dimaksud adalah nasionalisme anti kolonial abad XX sebagaimana terlihat di wilayah Asia maupun Afrika.

Baik diskursus poskolonial maupun nasionalisme, keduanya adalah kajian yang sifatnya memusat dan tidak diperlakukan sebagai instrumen yang gunanya menjadi anasir penyusun atas penjelasan makro yang diklaim koheren.

Kebutuhan akan penelitian non instrumentalis atas nasionalisme dalam studi Hubungan Internasional dengan sangat cemerlang ditunjukkan oleh Ben Anderson. Dengan gaya bahasa ironi, cerdas dan humor satir, Ben Anderson sanggup menunjukkan bahwa taman makam pahlawan nasional Amerika Serikat

mampu menjadi justifikasi simbolis pemerintah dalam mengklaim kesahihan kebijakannya untuk melancarkan intervensi militer, misalnya.

#### **D. Relevansi Pemikiran Benedict Anderson Terhadap Studi Hubungan Internasional**

Penyusun melihat bahwa untuk lebih memahami fenomena Hubungan Internasional kontemporer, konsep interaksi perlu dijelaskan sebagai titik temu banyak paradigma studi Hubungan Internasional. Interaksi yang dinilai secara populer sebagai modus kerja Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi melalui dan atau di dalam batas-batas wilayah negara tertentu dinilai sebagai perilaku Hubungan Internasional, siapapun subjek dari perilaku tersebut; individu, negara, kelompok organisasional, perusahaan, gerakan sosial, perhimpunan profesional dan sebagainya.

Ada tiga konsekuensi yang bisa ditarik dari konsep di atas, yaitu ; *pertama*, fenomena Hubungan Internasional menganggap bahwa ke-nasional-an adalah kesadaran yang sifatnya universal, dalam artinya yang paling longgar, ke-nasional-an adalah fenomena yang disadari oleh siapa saja dan di mana saja, pada gilirannya membentuk pemahaman mengenai "Aku" sebagai seluruh anasir yang dilekati oleh ke-nasional-an tadi, dan "dia" atau "mereka" sebagai orang-praktik dan ruang sosial, serta nilai yang asing, yang penanda paling jelasnya adalah garis batas di atas peta.<sup>12</sup> *Kedua*, state sentris adalah bias wajar dari konsep interaksi tersebut. sehingga tradisi Hubungan Internasional yang menempatkan state sentris di pusat kajiannya hanya akan melabeli fenomena-

<sup>12</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal 265-8

fenomena tertentu sebagai subjek kajian studi Hubungan Internasional. Pada gilirannya, fenomena-fenomena tersebut adalah apa-apa yang sifatnya menasional, direstui sebagai wakil negara, serta akhirnya, dinilai sebagai penting dalam konteks interaksi. *Ketiga*, jika ke-nasional-an dan state sentris yang menempati titik pusat dalam membedah fenomena-fenomena Hubungan Internasional, maka citra adalah segalanya. Dalam menempatkan diri *vis a vis* negara lain, tradisi studi Hubungan Internasional akan membedah bagaimana dan dengan apa aktor Hubungan Internasional mengemas dan menampilkan perilakunya dalam konteks internasional. Dengan kata lain, tradisi studi Hubungan Internasional adalah pengamat dari hubungan politisi-pebisnis-tokoh dengan media yang, tentu saja masih memperhatikan ke-nasional-an dan state sentris tadi.

Ketiga konsekuensi tersebut adalah isi sekaligus bingkai dan ekonomi-politik adalah kanvasnya. Tradisi studi Hubungan Internasional adalah tradisi panjang penceritaan tentang ekonomi politik, baik nasional maupun regional-internasional. Tak sah kiranya jika ketiga konsekuensi yang kita bicarakan di atas bukan atau belum menjadi derivasi (turunan) dari fenomena yang sifatnya lebih fundamental, yaitu ekonomi politik. Ke-nasional-an, asumsi state sentris dan citra adalah alat, sarana, dalam mewujudkan hasrat ekonomi politik yang diperjuangkan subjek studi Hubungan Internasional.

Dalam melakukan analisisnya terhadap budaya, sejarah dan sistem nilai yang berada di luar wilayah geografis kelahirannya, yaitu Eropa dan Amerika Utara, tradisi studi Hubungan Internasional ini menyandarkan kajiannya pada metode rasionalitas purposif khas Barat dengan dalil tercapainya objektivitas.

Rasionalitas tipe ini menangkap, menempatkan objek kajiannya di luar dirinya, membongkar, membentuk ulang, mengemas dan akhirnya menjinakkan objek kajiannya dalam narasi yang diklaim objektif, akrab disebut sebagai sejarah.

Objektifitas pun belum cukup sebagai alasan bagi rasionalitas purposif. Bagi rasionalitas ini, ada gen tertentu yang diklaim rasional-ilmiah dalam ras Eropa dan turunannya Amerika Serikat, yang menciptakan kualitas superior atas ras lain sehingga kecerdasan, kebudayaan, etika dan moralitas Barat bukan hanya lebih baik dari selain dirinya melainkan juga absah dalam menundukkan lalu membentuk ulang kecerdasan, kebudayaan, etika dan moralitas ras lain.

Apa yang penyusun sebut sebagai tradisi studi Hubungan Internasional pada bagian ini adalah tradisi dominan dalam bangunan diskursus studi Hubungan Internasional kontemporer. Tradisi ini lazim dikenal dengan istilah tradisi perspektif struktural. Penyeimbang perspektif ini dikenal dengan perspektif kultural-emphatis dan Ben Anderson adalah anasir penting dalam tradisi ini.

Menurut Martin Griffiths, kontribusi Ben Anderson dalam studi Hubungan Internasional muncul dari satu buku yang terkenal apalagi kalau bukan *Imagined Communities: Reflection Of The Origin and Spread Of Nationalism* yang terbit pertama kali pada tahun 1983 lalu disempurnakan delapan tahun kemudian.<sup>13</sup> *Imagined Communities* merupakan hasil refleksi bertahun-tahun Ben Anderson atas kepustakaan yang dibacanya dengan semangat tinggi.

Dalam *Imagined Communities*, mahasiswa Hubungan Internasional dimungkinkan untuk menelaah kekuatan nasionalisme di era modern, apalagi jika

<sup>13</sup> lihat Martin Griffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Hal. 346

penelaahan tadi ditambah dengan kepercayaan bahwa negara-bangsa seharusnya ditransendentasi ke level yang sama dengan fenomena kesadaran lainnya, anggaplah ideologi, agar negara-bangsa sebagai realitas bisa lebih jelas dipahami dan bukan sekedar aktor Hubungan Internasional.

Dalam studi Hubungan Internasional, nasionalisme telah menduduki posisi sentral bagi seluruh aktor studi Hubungan Internasional. Pada level individu, nasionalisme hari ini, pada beberapa tempat, telah menggantikan peran agama, contohnya sebagai penegas asal-usul, kidung pujian, harapan akan keselamatan dari penderitaan dan akhirnya nasionalitas adalah jawaban untuk pertanyaan "orang luar" : "Saya orang Indonesia" untuk pertanyaan seorang teman baru dari Denmark tidak hanya merujuk pada wilayah geografis tertentu, melainkan pada aspirasi ideologis tertentu; semacam asal-usul (nenek moyang, cerita rakyat, sejarah revolusi) dan masa depan (cita-cita yang diniatkan sebagai proyek nasional atau sekadar aspirasi)<sup>14</sup> yang sifatnya tak dipenuhi oleh otoritas yang sedang berkuasa.

Pada level kelompok, semakin sukses nasionalisme multikultural dikonsolidasikan, semakin terkukuhkan identitas beragam agama, suku, ras, golongan dan apapun yang bisa disebut "konsolidasi dari gabungan individu yang memiliki kesamaan untuk mengukuhkan semacam tujuan dan nilai, sebagai sah untuk diperjuangkan". Contoh konkrit untuk mengevaluasi gagasan ini adalah hasrat dari sebagian masyarakat Islam untuk memberlakukan Syariat Islam sebagai basis nilai bagi pelaksanaan tata kenegaraan. Halangan pertama yang mesti dilewati oleh Syariat Islam untuk ditetapkan dalam wilayah nasional

<sup>14</sup> Lihat Nirwan Dewanto, *Senjakala Kebudayaan*, Benteng, Yogyakarta; 1998

saja, mereka juga merelakan dirinya untk dikorbankan demi ke-nasional-an Denmark, yang bukan Irlandia atau Singapura.<sup>15</sup>

Menurut penyusun, ke-nasional-an berhasil diteguhkan oleh Ben Anderson sebagai elemen vital dalam menelaah fenomena-fenomena Hubungan Internasional, bahkan meningkat signifikansinya semenjak dua perang dunia (perang ditandai sebagai fenomena Hubungan Internasional dengan corak nasionalitas yang begitu jelas), sebab betapa tidak, kapitalisme dengan sistem komunikasi mampu menghadirkan kepungan citra yang memaksa individu, kelompok maupun negara untuk mencari dan meneguhkan identitas tertentu sebagai pengikat makna atau basis legitimasi atas praktek, ruang sosial dan wilayah geografis tertentu.

---

<sup>15</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 11

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**NASIONALISME NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA**  
**MENURUT BENEDICT ANDERSON**

**A. Asal-Usul Asia Tenggara**

Menurut Benedict Anderson, wilayah yang kita kenal dengan nama Asia Tenggara selama ini menyandang namanya dalam usia yang relatif muda. Konsep Cina lama *Nanyang* yang terjemahan bebasnya berarti wilayah selatan, serta konsep Jepang *Nampo* merentang oleh apa yang orang Amerika sebut Pasifik barat daya, merupakan konsep-konsep yang sering dipakai untuk membayangkan wilayah yang dewasa ini kita kenal sebagai Asia Tenggara. Istilah Asia Tenggara (*South-East Asia*) muncul pertama kali sebagai istilah politis dari kolonialis Britania Raya seksi komando India berjudul *Louis Mountbatten's South-East Asia*, meski tak memasukkan Hindia Belanda juga Filipina.<sup>1</sup>

Kekuatan lain yang menggunakan istilah tersebut adalah institusi perguruan tinggi Anglo-Saxon dengan diterbitkannya pada tahun 1941 buku *Welfare and Progress in South-East Asia*, serta pada tahun 1942 buku *Educational Progress in South-East Asia* yang ditulis oleh sarajana besar koloni Inggris John Furnivall.

---

<sup>1</sup> Lihat Ben Anderson, *Hantu Komparasi*, hal. 4



Ben Anderson mencoba memberikan jawaban bagi pertanyaan mengapa penamaan wilayah tersebut begitu terlambat. Ia menemukan bahwa sebab keterlambatan tersebut adalah tidak terdapatnya suatu kekuasaan hegemonik tunggal di kawasan tersebut seperti kerajaan Turki Ustmani bagi Timur Dekat atau Jauh atau raja-raja dinasti Peking di Cina. Namun ada faktor lain yang lebih ditekankan Ben Anderson ketika menjawab pertanyaan tersebut. Keterlambatan Asia Tenggara “ditemukan” disebabkan oleh heterogenitas kolonialisme Eropa dan belakangan Amerika Serikat yang mengoperasikan dirinya di kawasan tersebut. Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Amerika Serikat adalah kolonialis-kolonialis dengan kebiasaan bersaing yang begitu tinggi. Dalam kata-kata Ben Anderson<sup>2</sup>, “terpencil, heterogen dan boleh di bilang tersegmentasi secara imperial tidaklah terlalu mengherankan sehingga wilayah regional ini terlambat memiliki nama yang sama”.

Jika peta diperhatikan maka wilayah New Guinea sebelah timur tidak termasuk wilayah organisasi regional ASEAN (*Association Of South East Asian Nation*), satu dari banyak fenomena Asia Tenggara yang, setelah ditemukan, tak pernah berhenti diperbincangkan. Hal ini merupakan eksekusi dari perang Pasifik, dekolonisasi pasca perang yang cepat, permulaan perang dingin dan upaya Amerika Serikat untuk menggeser Jepang sebagai hegemon regional tunggal. Hal-hal di atas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 7

inilah yang menginisiasi dan menciptakan pembayangan modern tentang Asia Tenggara.<sup>3</sup>

### **B. Sensus, Peta dan Museum Sebagai Institusi Pembayangan**

Selanjutnya penyusun akan mengangkat kasus Indonesia, Thailand dan Filipina sebagai medan pengujian teori nasionalisme Ben Anderson. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Ben Anderson adalah spesialis politik Indonesia, Thailand dan Filipina sehingga karya Ben Anderson tentang ketiga negara di atas adalah karya-karya utuh dan mapan. Penelitian atas karya-karya tersebut penyusun lakukan dengan menelaah tiga karya Ben Anderson yang telah diterjemahkan, yaitu buku *Imagined Communities* (edisi revisi, 1991), *Hantu Komparasi* (2002) dan *Kuasa Kata* (2002). Namun sebagai pengantar untuk memahami nasionalisme wilayah Asia Tenggara secara jamak dan umum, penyusun merasa perlu menampilkan kajian Ben Anderson atas sejarah Asia Tenggara serta evolusi sensus, peta dan museum sebagai institusi-institusi yang melahirkan kemampuan membayangkan diri secara nasional bagi negara-negara Asia Tenggara.

Apa yang sejauh ini penyusun sarikan dari *Imagined communities* versi awal (1983), tentang asal-usul nasionalisme anti kolonial, telah direvisi oleh Benedict Anderson dalam versi revisi *Imagined Communities* (1991). Pada edisi revisi tersebut, menurut Ben Anderson, nasionalisme anti kolonial tidak hanya meminjam anasir-anasir nasionalisme kebahasaan / kerakyatan Eropa, serta nasionalisme resmi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 8

melainkan —dan ini mendapat penekanan serius dari Ben Anderson— juga sangat disokong oleh institusi kekuasaan negara kolonial yang menjajahnya. Ketiga institusi tersebut adalah cacah jiwa atau sensus, museum dan peta.

Dengan institusi ini, *panopticon foucoultian*<sup>4</sup> negara kolonial beroperasi atas masyarakat jajahnya; mengetahui hakikat manusia-manusia yang dijajahnya, letak pemukimannya, tatak letak permukaan buminya dan legitimasi keleluhurannya. Kawasan penelitian Ben Anderson adalah Asia Tenggara dengan merujuk pada sosiolog Charles Hirschman untuk kajian sensus, sejarawan Thailand Thongchai Winichakul untuk kajian peta dan mengandalkan dirinya sendiri dalam menganalisa museum. Meski Hirschman dan Winichakul dijadikan referensi oleh Ben Anderson, orisinalitasnya pada kajian evolusi peta dan sensus Asia Tenggara begitu tinggi sehingga sumbangsih Hirschman dan Winichakul pada dasarnya hanya pelengkap bagi asumsi koheren yang coba dikembangkan oleh Ben Anderson.

## 1. Sensus

Sensus atau cacah jiwa memiliki tempat khusus dalam nalar kolonialisme yang menjajah Asia Tenggara. Inggris, Perancis, Portugis, Belanda, belakangan Amerika Serikat menggunakan sensus sebagai alat paling pas untuk menata jajahnya. Hirschman memulai kajiannya dengan mengamati perkembangan sensus kolonial Britania Raya di semenanjung Melayu dan kawasan pemukiman selat, dan

<sup>4</sup> Konsep *Panopticon* dari Foucault bermakna teroperasinya sistem pengawasan super ketat dari otoritas tertentu, misalnya Negara atas rakyat, dalam bentuk sistem pendidikan, penjara, rumah sakit jiwa, angket penelitian dan sebagainya, lihat Michel Foucault, *Kegilaan dan Peradaban*, Icon, Yogyakarta; 2002

pewarisnya, siapa lagi kalau bukan negara merdeka Malaysia. Dari abad XIX sampai pertengahan abad XX, Hirschman melihat bahwa rentetan perubahan yang bukan main cepatnya dalam cara di mana kategori-kategori terus menerus dimampatkan, dipecah-pecah, dipadukan kembali, dicampur baurkan dan ditata kembali dengan kelas penguasa yang tetap berada di puncak hierarki adalah modus negara kolonial untuk tetap mengawasi jajahannya.

Sensus menyajikan data atau lebih tepatnya yang dianggap data yang disarikan dari pengamatan atas jajahannya, sehingga tetap terpahami dan akhirnya terkontrol. Namun karakter sensus tidak pasif, dalam artian hanya menyarikan data namun juga aktif dalam artian para pencacah atau negara kolonial sangat aktif menggolongkan jajahannya, sehingga secara politis ada banyak efek yang timbul. Antara lain; *pertama*, penjajah menjaga agar puncak stratifikasi sosial tetap di duduki oleh kelompok sosial yang sifatnya kompromistis dan non-revilusioner terhadap penjajah. Didudukkannya kelas non-revolusioner di puncak stratifikasi sosial (artinya punya peluang paling besar untuk hidup, katakanlah punya privelese khusus atau punya kemudahan untuk jadi pegawai kolonial) adalah untuk menjadikannya pelindung dari perlawanan kelas bawah. Penguasa pribumi cenderung memiliki kekuasaan feodalistis untuk menghambat gagasan / gerakan perlawanan anti kolonial, sehingga penjajah tetap aman posisinya.

*Kedua*, kelompok-kelompok yang diciptakan makin bersifat eksklusif dan rasial dan secara bersamaan kategori-kategori keagamaan mulai hilang. Kategori "ummat Hindu" disisipkan ke dalam "orang Kling" dan "orang Bengali" pada sensus

tahun 1871, yang berubah menjadi kategori “orang-orang Tamil dan pribumi India lainnya” yang dimaksudkan untuk menampung “orang Sikh”, “orang Hindu”, “orang Birma” dan “orang Tamil”. Kecenderungan rasial sensus kolonial Britania Raya ini diwarisi oleh Malaysia merdeka, hanya saja diubah komposisinya dan peningkatannya, menjadi kebangsaan Malaysia, Tionghoa, India dan lain-lain.

*Ketiga*, pembagian kategori kepada seseorang atau kelompok sosial tertentu bersifat sewenang-wenang, sehingga sangat sedikit yang mau mensahihkan kategori tersebut atas dirinya. Ini berimplikasi, misalnya bahwa kolonial Britania Raya secara tak sadar telah mengklaim bentangan populasi “Jawa”, “Sunda”, “Sulawesi” menurut bentangan geografis wilayah jajahannya. Efeknya gampang terlihat, orang “Jawa”, “Sunda”, “Sulawesi”, “Kalimantan” dan “Sumatera” tadi adalah jajahannya dan kelak diwarisi Malaysia merdeka. Pembayangan oleh negara kolonial adalah akar sejati klaim kesahihan negara merdeka atas populasi tertentu. Sensus ditambah catatan-catatan sekolah (raport, ijasah), pengadilan-pengadilan, klinik-klinik, kantor-kantor polisi dan imigrasi menjadikan pembayangan yang melandasi transformasi kolonial menjadi formasi nasional menjadi mungkin.

*Keempat*, pembayangan ini berefek tajam pada struktur sosial negara merdeka ke depan. Contoh paling menyedihkan adalah kategori “*chino*” yang disematkan oleh kolonial Belanda atas etnis Tionghoa yang sebelum dilakukannya sensus kolonial, adalah karib masyarakat pribumi tanpa pembedaan rasial apapun. “*Chino*” pun diwariskan dan berefek dikeluarkannya “*Chino*” dari unsur-unsur asli

pribumi yang sedikit banyak menjustifikasi kerusuhan rasial di Indonesia pada abad ke-XX sampai baru-baru ini.

*Kelima*, sensus menertibkan. Dalam pengertian seorang “Jawa” dan “Cina” mesti tinggal, berpakaian, kawin, beragama dan dikuburkan sebagai “Jawa” atau “Cina”. Ketertiban ini perlu agar kuasa kolonial tetap bertahan.<sup>5</sup>

## 2. Peta

Peta menggosok sakralitas menjadi selularitas. Bagaimanapun khusyuknya Mekkah, Yerusalem dan Vatikan dibayangkan oleh komunitas-komunitas religius, lambat laun oleh matematika, navigasi dan kompas, telah berubah menjadi titik-titik di atas lembaran bernama peta. Sakralitas yang tadi ada dialami, mendapatkan tandangnya berupa selularitas yang diwakili oleh titik-titik dengan jumlah lebih banyak; New Delhi, London, Batavia, Texas dan seterusnya.<sup>6</sup>

Peta *mercatorian* yang dibawa masuk aparat kolonial Eropa, melalui kapitalisme-cetak, membentuk pembayangan baru untuk orang-orang di Asia Tenggara. Ben Anderson menyelidiki buku Tongchai Winichakul, *Siam Mapped: A History Of Geo-Body Of A Nation* dari Thailand untuk sampai pada kesimpulan di atas. Winichakul dengan sistematis memperlihatkan proses rumit yang mendorong terciptanya Thailand pada 1850-1919.

Sampai dinobatkannya Rama IV, hanya dua jenis peta yang ditemukan di Thailand. Yang pertama adalah peta teologis yang dibuat oleh komunitas religius

<sup>5</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 251-9.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 262

Buddhis berupa ideogram-ideogram surga untuk wilayah di atas bumi dan neraka untuk wilayah di bawah perut bumi. Jenis kedua adalah peta sekuler berupa gambaran darat dan laut yang dikonsepsi oleh pelaut Thailand dalam bentuk yang semrawut karena tidak mengenal teknik skala dalam menggambar peta tersebut. Ciri esensial kedua peta ini adalah keduanya tidak menandai batas-batas negara. Kalaupun batas itu ada, maka ia terlihat serupa garis-garis yang ditatap dari bawah, bukan dari atas sebagaimana peta Eropa. Karena ditatap secara hirozontal, maka batas wilayah kaisar tidak begitu jelas.

Barulah pada dasawarsa 1870-an, para pemimpin Thailand membatasi wilayah kedaulatannya, membedakannya dengan wilayah kedaulatan negara lain dengan menggunakan peta dan buku ajar geografis pertama di Thailand ciptaan misionaris Amerika J. W. Van Dyke, produk awal kapitalisme-catak yang mulai merambah Thailand. Ini membawa dampak nyata pada kosakata perpolitikan Thai, di mana kata-kata tradisional *krung* dan *muang* menghilang perlahan (yang mewakili konsepsi keruangan sebagai wilayah kekuasaan ibukota-ibukota keramat), berganti *Prathet* artinya negeri, kosa kata yang mewakili pembayangan wilayah dalam bingkai ruang dengan batas-batas tertentu.<sup>7</sup>

Sama seperti sensus, peta juga menggolong-golongkan wilayah secara total, sebagai daerah kekuasaan satu, dan hanya satu-satunya negara. Sejak kronometer (alat pengukur kontur bumi yang membagi bumi ke dalam kotak-kotak dengan ukuran eksak) pada tahun 1761, penghitungan meredian bisa dilakukan secara persis

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 265

dan seluruh permukaan lengkung planet bumi telah menjadi subjek geografis berupa pengkotakan dengan keluasan yang persis sama di atas kertas. Pada gilirannya, adalah tugas militer dan navigasi peta untuk mengisi kotak-kotak kosong tadi yang masih berupa wilayah yang tak terjajah, momen-momen akar kelahiran kolonialisme. Namun, kejutan peta tak berhenti sampai di situ saja dalam tugasnya melancarkan pembayangan komunitas-komunitas nasional. Peta bukanlah wakil realitas geografis, melainkan model bagi realitas geografis. Peta, dengan pengukuran merediannya yang dingin dan matematis, adalah rujukan bagi negara manapun dalam merumuskan ruang geografis kedaulatannya dan tidak pernah melakukan pengklaiman lebih dulu baru kemudian melirik peta. Petalah tolak ukur wilayah suatu negara. Dengan kata lain, peta adalah kulminasi hasrat dan pembayangan nasional yang menunggu untuk direalisasikan dengan penuh semangat.

Peta dan sensus bekerjasama dalam menampilkan narasi kolonial yang koheren, yang memandang "manusia" dan "bumi" jajahan sebagai hak milik. Ini dilakukan dengan dua cara, *pertama*, peta membatasi secara teritorial rangkaian mobilitas penduduk "Jawa" yang ke "Malaysia" atau penduduk "Serawak" yang ke "Bangkok". *Kedua*, peta sebagai logo. Dalam peta resmi kemaharajaan Britania Raya, peta wilayah jajahan biasanya berwarna merah jambu, koloni Perancis berwarna jingga biru dan taklukan-taklukan Belanda berwarna kuning coklat. Karena berwarna berbeda, setiap wilayah bisa diganti dan dipadu padankan dengan wilayah lain. Lalu nama gunung, sungai, tempat tidak berarti lagi, sebab yang penting adalah warnanya. Dalam bentuk seperti ini, peta memasuki rangkain-



rangkaian produksi mekanistik yang tak berhingga, tersedia untuk dicetak di poster-poster, teko-teko teh, permadani, dinding sekolah, peranko dan lain-lain. Dengan cirinya yang komunikatif, populis, langsung dikenali, terdapat di mana saja, peta-logo telah menjadi unsur penting gerakan anti kolonial yang sedang merangkak.

Indonesia modern memberi contoh yang menyedihkan tentang fenomena tersebut. New Guinea sebelah barat sering dijadikan wilayah pembuangan bagi tahanan politik oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena tercetak sebagai peta logo, maka Sukarno tak henti-hentinya meminta dalam pidatonya agar Irian Jaya (sebutan Sukarno untuk wilayah New Guinea sebelah barat) dikembalikan ke pangkuan Republik Indonesia. Bayangan bahwa Indonesia merentang dari Sabang sampai Merauke mensahihkan Sukarno melakukan aktifitasnya. Meski selain selusin tahanan politik, tak seorang nasionalis pun yang pernah menginjak pulau tersebut. Baru pada tahun 1963, ketika Belanda pergi, Sukarno atau Indonesia menginjakkan kakinya di sana.<sup>8</sup>

Maka munculnya gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah hal wajar. Dan negara mengambil sikap yang keras terhadap pergerakan yang dipicunya sendiri. Irian adalah pengingat bahwa negara Indonesia mewarisi cara pandang kolonial Belanda dalam mengenali daerah jajahannya; petakan, klaim, bersihkan nasionalisnya. Maka dimulailah serentetan kekerasan itu.

### 3. Museum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 269-271

Museum-museum serta imajinasi yang ditampilkan dalam museum, sama-sama sangat politis. Apa yang bisa dipahami dari munculnya museum-museum di Irian yang diorganisir oleh Jakarta yang jauh? Penting kiranya jika menengok aktifitas arkeologi kolonial Belanda sebagai leluhur terdekat negara Republik Indonesia.

Pada Thomas Stanford Raffles-lah citra kolonial penguasa arkeologis layak dilekatkan. Dengan minat tinggi, Raffles mengoleksi dan meneliti artefak-artefak, candi-candi, monumen-monumen, prasasti-prasasti dan lain sebagainya artefak “Hindia Belanda” pramodern. Dengan cepat, jawatan arkeologis kolonial menjadi lembaga yang kuat dan bergengsi. Maka dengan intensitas yang menakjubkan, Borobudur, Angkor, Pagan dan berbagai macam situs purba digali, dibersihkan, diukur, dipotret, direkonstruksi, dipagari, dianalisis dan dipamerkan.<sup>9</sup>

Negara kolonial membersihkan situs-situs tadi dari perayaan ritual keagamaan, gangguan penduduk sekitar dan hanya mengizinkan aktifitas turisme ala kadarnya. Selanjutnya adalah mengubah, mungkin lebih tepatnya menjadikan situs-situs tadi titik-titik dalam peta; cacah jiwa kultural dengan fungsi yang sama dengan cacah jiwa individual sebagaimana dijelaskan di depan.

Mengapa negara, dengan dana besar dan perhatian ekstra mau menyelidiki situs arkeologis? Ben Anderson mengutarakan tiga alasan non ilmiah yang menjadi motif negara kolonial. *Pertama*, kebijakan-kebijakan arkeologis merupakan eksese tuntutan dari revolusioner pribumi maupun Belanda yang menginginkan kualitas

<sup>9</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 274

pendidikan pribumi ditingkatkan. *Kedua*, pencurahan energi arkeologis ini merupakan aksi ideologis bagi masyarakat pribumi antara pembangun situs (raja, kesatria) dan budaknya (masyarakat luas) tetap terpelihara. Dengan hierarki ini, kolonialis Belanda menghadirkan efek psikologis “manusia kerumunan”-nya Nietzsche<sup>10</sup> bagi penduduk sekitar, sehingga lebih gampang diatur dan dikuasai.

*Ketiga*, dan ini yang terpenting, karena keterdesakan oleh diskursus liberalisme dan humanisme yang menggoyang kesahihan kolonialisme, maka negara kolonial mengambil strategi memutar dengan melekatkan pada dirinya citra sebagai penjaga tradisi yang universal namun juga bersifat lokal. Lalu persentuhannya dengan kapitalisme cetak dalam bentuk peranko Borobudur, permadani Angkor, tinggal selangkah lagi menuju pasar; ayam goreng Borobudur, hotel Angkor, lukisan Pagan. Logoisasi menciptakan replika yang begitu banyak, mengendap dalam kesadaran dan begitu muncul langsung dikenali sebagai Borobudur atau Angkor meski dari sebuah peranko. Namun penghindaran dari humanisme dan liberalisme serta penemuan pasar pariwisata belum menjelaskan secara total maksud politis museum. Curahan energi arkeologis dimaksudkan untuk menghadirkan aura keagungan bagi negara kolonial sekular. Sahih untuk mengklaim dirinya agung bila bukti bahwa penaklukkannya atas budaya agung yang lain bisa ditemukan di mana-mana. Arkeologi adalah aktifitas politik.

Pembayangan negara kolonial diwarisi oleh negara nasional merdeka. Di ruang kelas di Sekolah Dasar Tamalanrea, Makassar, akan di jumpai lukisan Candi

<sup>10</sup> Nietzsche dalam F. Budi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian*. Gramedia, Jakarta: 2003, hal. 124-5

Prambanan sebagai “Prambanan kita”; pengesah komunitas sekaligus perekat budaya-budaya yang berbeda (antara budaya Prambanan yang Jawa dan Baco yang Makassar). Apa-apa yang dianggap mampu di-nasional-kan akan segera dicetak, disebarluaskan dan dipahami sebagai nasional; Imam Bonjol pada kertas uang, masjid Istiqlal di kalender, Moneman Nasional di televisi dan —ini yang paling absurd— Taman Mini Indonesia Indah yang diniatkan sebagai monumen ambisius Orde Baru untuk merangkul suku-suku majemuk di daerah ke dalam entitas yang bernama “Indonesia”.

### C. Nasionalisme Indonesia

Tak terlalu mengejutkan jika analisis Ben Anderson terhadap nasionalisme Indonesia bertumpu pada sistem pendidikan kolonial Belanda serta peranan bahasa nasional Indonesia yang merupakan ekses kapitalisme cetak kolonial Belanda<sup>11</sup>. Kebutuhan negara kolonial akan tenaga administratif dengan kemampuan bilingual disebabkan betapa luas wilayah jajahannya serta betapa besar kebutuhan pasokan bahan baku untuk pasar Eropa, mendesak Belanda, dalam kebijakan yang kita kenal sebagai “Politik Etis” agar mendirikan sekolah-sekolah tinggi di Batavia dan Bandung, dua pusat pendidikan kolonial hari itu<sup>12</sup>. Sekolah setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan didirikan di daerah-daerah tertentu dan kosekuensinya segera terlihat.

<sup>11</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities*, hal. 200-2

<sup>12</sup> Lihat John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan*, LP3S, Jakarta; 1983 .hal.1

*Pertama*, aliran peziarah sekular yang bermula di daerah lintas menuju Batavia dan Bandung yang puncaknya di Den Hag, Amsterdam serta Leiden telah menciptakan kesadaran akan “ke-siapa-an kita” ini. Asal usul yang beragam dari murid-murid di satu kelas merepresentasikan bentuk empiris dari komponen penyusun “kita”. Rasa kesepian sebagai peziarah terobati dengan memandang teman sekelas. Dan pertanyaan tentang “mengapa kita” di sini adalah pertanyaan krusial dalam memantik pembayangan awal tentang “kita”; jajahan dan pada gilirannya Indonesia.

*Kedua*, sifat logo peta yang bisa direproduksi secara massal, telah terbukti sebagai fiksi yang merembes masuk dalam kenyataan. Peta di ruang kelas pada sistem pendidikan kolonial Belanda berbicara banyak. Hindianya Belanda berbeda warna dengan Vietnamnya Prancis, Filipinanya Amerika Serikat serta Semenanjung Malayanya Inggris. Peta yang tercandra di benak siswa-siswa tersebut adalah hak yang mesti utuh seluruh berpindah tangan, kelak, dari Belanda ke tangan Indonesia. Sifat fiktif peta sebagai ruukan dan bukan model dari komponen geografis telah dijelaskan di depan. Fiksi ini berakibat dua fenomena buruk yaitu kekerasan yang meledak di Irian Jaya pada zaman Sukarno dan kekerasan di Timor-Timur pada zaman Soeharto.

*Ketiga*, politik *inlander* yang rasis, dengan penekanan yang keras dari kubu kolonial untuk menstratifikasi para *inlander* telah memberi penghuni pada peta di ruang kelas tersebut. Para *natives-native* itulah Indonesia, yang lain, orang-orang asing dari Timur yang meliputi etnis Tionghoa, Arab dan Jepang, bukan Indonesia.

Stratifikasi rasis ini, dalam konteks Hindia Belanda, memiliki efek memilukan tanpa rasa permusuhan yang berujung pada kerusuhan etnis di hari-hari mendatang.

Ben Anderson mengakui bahwa telah ada sistem pendidikan yang asli pribumi sebelum tercipta sistem pendidikan kolonial namun bersifat lokal dan pribadi, meskipun tradisi Islam dengan institusi pesantren yang memungkinkan seorang santri melakukan mobilitas dalam bentuk perpindahan lokasi berguru dari satu daerah ke daerah lain, tetap belum mampu menyediakan basis pengalaman tentang “kita” yang begitu solid meski tersusun dari banyak etnis, banyak karakter linguistik, terpisah secara geografis. Pembayangan ini hanya dimungkinkan oleh sekolah-sekolah yang berjenjang secara kolosal, sangat terrasionalisasi, terpusat secara ketat secara struktural analog dengan birokrasi negara, buku-buku ajar yang seragam, ijasah-ijazah dan sertifikat-sertifikat guru yang terstandarkan, gradasi kelompok umur yang diatur ketat, kelas-kelas serta bahan-bahan pengajaran yang ditentukan, semuanya itu adalah jagad koheren di mana pembayangan nasional bisa dipantik.

Nasionalisme Indonesia adalah perwujudan menarik antara sistem pendidikan dan kapitalisme cetak yang menginisiasi bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia.<sup>13</sup> Jika sisten pendidikan menyediakan kesadaran kolektif tentang “kita”, maka kapitalisme menyebabkan pembayangan tersebut, mengintensifikannya, mengkonsolidasikannya dan pada akhirnya menggerakkannya.

---

<sup>13</sup> Lihat Ben Anderson, *Kuasa Kata*, Hal. 270

Surat kabar, novel, pamflet, buku (traktat sistematis, otobiografi nasionalis awal seperti dr. Soetomo, khasanah pra kolonial seperti serat), telah mengukuhkan kesadaran yang sifatnya nasional.<sup>14</sup> Kesadaran tersebut dioperasikan oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehingga setiap ide, setiap peristiwa, setiap gambaran mengenai suatu tempat, suatu esay, suatu waktu bisa dibagi, dikonsumsi bersama dan terutama, bisa diwariskan.

Inilah mengapa pada abad ke-20, orang-orang Sumatera menganggap asing orang-orang Malaysia padahal agama, praktek konsumsi, bahasa daerah dan adat istiadatnya memiliki kemiripan dan menganggap sama, identik dalam arti terpayungi suatu nasionalitas dengan orang Ambon, entitas sosial yang berbeda bahasa daerah, agama, adat-istiadat dan terpisah begitu jauh.

Menurut hemat penyusun, Ben Anderson tidak mempersoalkan kedudukan esensial nasionalisme sebagai faham alternatif antara Islam dan komunisme.<sup>15</sup> Ben Anderson hanya memfokuskan kajiannya pada aktor penggerak dan pewaris nasionalisme sebagai faham dan gerakan yaitu "pemuda". Pemuda yang di maksud tentulah pemuda yang berpendidikan kolonial.

Dalam disertasinya, *Pemuda Revolution*, Ben Anderson menganggap pendapat mentornya sendiri, George Kahin, penulis *Nationalism and Revolution In Indonesia*. Kahin menempatkan elit sebagai poros revolusi Indonesia pada 1945, dengan fokusnya elit pergerakan. Ben Anderson mengambil posisi lain, bahwa elit hanya memainkan peranan kecil dalam masa revolusi tersebut, selebihnya dimainkan

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 499-626

<sup>15</sup> Lihat John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan*, LP3S, Jakarta; 1983 .hal. 4

oleh pemuda sebagai segmen sosial dengan jaringan yang luas, yang terdiri dari siswa dan alumni pendidikan kolonial, pesantren dan perhimpunan-perhimpunan seperti Jong Java, Jong Celebes, dsb. Tak ada yang meragukan kontribusi tokoh-tokoh elit seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, atau yang lainnya, namun pergerakan revolusi hari itu terlalu kaya untuk hanya dibingkai sebagai ekspresi dari elit-elit tadi.

Konfrontasi elit dan "pemuda" masih membayangi kemudian ketika Ben Anderson menyuarakan kekecawaannya terhadap elit revolusi yang terlalu menekan "pemuda". Menurut Ben Anderson, watak revolusi Indonesia adalah revolusi nasional, dan bukannya revolusi sosial sebagaimana mungkin terwujud jika gagasan-gagasan pemuda, yang tercermin pada diri Tan Malaka lebih memperoleh ruang bagi aktualisasinya.

Revolusi nasional berkarakter nasional, dalam artian perubahan yang dicapai berskala nasional dalam status, dari jajahan menjadi merdeka, diperoleh melalui jalan diplomatis dan menjadi 'cetakan' bagi negara dalam menjalankan praktek hegemoninya kepada 'rakyat'. Dimana Ben Anderson, Sjahrir adalah representasi revolusi nasional. Yang diangankan Ben Anderson sebagai pencinta Indonesia adalah revolusi sosial, dalam arti ia dilakukan oleh rakyat secara kolektif, tidak hanya mengubah status tapi juga mengubah kemelaratan menjadi kemakmuran, kebodohan menjadi pencerahan, keterbelakangan menjadi kemajuan, revolusi yang



bersifat populis, representatif, direbut dengan jalan pemberontakan dan diabdikan bagi 'rakyat'.<sup>16</sup>

#### D. Nasionalisme Thailand

Seiring pengekangan rezim Orde Baru terhadap Ben Anderson, terjadi rangkaian fenomena menarik di Thailand. Maka, mungkin dengan niat melakukan studi komparasi dengan Indonesia. Ben Anderson mengalihkan energi ke tanah para raja yang tak pernah dijajah tersebut. Meskipun demikian, minat Ben Anderson terhadap *Indonesianya* tetap menyala, ini terbukti dengan tetap menyoroti perkembangan Indonesia pasca pengekangan dirinya. Jika diperhatikan, pengalihan perhatian Ben Anderson kepada Thailand merupakan pijakan pertamanya dalam menciptakan *Imagined Communities*; proyek yang mengubah dirinya dari pakar politik suatu negara menjadi pakar studi kawasan, lalu akhirnya, generalisator teoritis dengan skala global.

Kesan kontroversial masih mengikuti Ben Anderson dalam analisisnya terhadap nasionalisme Thailand. Jika dalam studi tentang nasionalisme Indonesia Ben Anderson menyanggah Kahin, maka dalam analisisnya terhadap nasionalisme Thailand, Ben Anderson menyanggah pendekatan-pendekatan budaya terhadap Thailand. Merupakan sesuatu yang lazim dikalangan pakar bahwa Thailand memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari negara-negara Asia Tenggara

<sup>16</sup> Lihat Ben Anderson dalam Griffiths, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, hal. 346

yang lain. Ciri-ciri tersebut adalah inkolonialisasi Thailand, langgengnya dinasti Jakri sebagai penerus, peletak dan pengawal nasionalisme Thailand.

Ben Anderson memperingatkan bahwa pendekatan kultural bersifat ahistoris, konservatif dan tidak kritis, dan karenanya pembahasan mengenai nasionalisme Thailand menganalisis aspek-aspek yang objektif dalam masyarakat. Maka analisis kelas pun dipilih oleh Ben Anderson, analisis kelas dalam bentuknya yang paling longgar, yang tidak mesti khas Marxis.

Sampai di sini, penyusun menangkap adanya patahan dalam alur pemikiran Ben Anderson. Jika nasionalisme Indonesia dianalisis berdasarkan pendekatan kultural seperti gagasan terhadap pemuda sebagai segmen dan energi sosial yang dilawankan dengan elit, maka pembahasan tentang nasionalisme Thailand mengambil arah sebaliknya. Analisis bertumpu pada kelas sosial gaya non-Marxis, dengan unit analisa dinasti Jakri, borjuis Thailand dan kehadiran Amerika Serikat sebagai respon terhadap perang Vietnam dan tentu saja, militer Thailand.<sup>17</sup>

Ben Anderson sepakat bahwa dinasti Jakri memupuk benih-benih nasionalisme awal dalam bentuknya yang kedua yaitu nasionalisme resmi. Yang paling terkenal sebagai raja diplomatis adalah Rama V (Chulalongkhorn) yang telah menjalin kontak dengan sesama dinasti tua di Eropa, bahkan ia mengirim anak dan keponakan lelakinya untuk belajar model-model dunia di London, Berlin dan St. Petersburg. Namun, baru pada zaman Rama VI-lah resti intermonarkis bisa disandang Thailand.

---

<sup>17</sup> Lihat Ben Anderson, *Hantu Komparasi*, hal. 253-9

Selanjutnya, Ben Anderson dalam melihat nasionalisme resmi Thai, menyatakan bahwa ia adalah pewaris asli wilayah administratif kolonialis-kolonialis yang mengoperasikan dirinya di sekitar wilayah kerajaan, meski secara tidak langsung. Batas-batas wilayah Thailand hari ini dikonsepsi pertama-tama oleh kolonial-kolonial negeri tetangga seperti Perancis di Vietnam dan Inggris di semenanjung Malaya. Peta modern Thailand yang direproduksi pada zaman Rama V telah menjelaskan hal ini sebagaimana penyusun utarakan di depan.

Dari sini, Ben Anderson berpendapat bahwa bukan dinastilah yang melahirkan nasionalisme populis-kerakyatan sebagaimana klaim sebagian besar pakar. Tidak, bahkan dinasti Jakri cenderung menghambat gerakan-gerakan transformasi populis yang digerakkan dari bawah. Ben Anderson memandang bahwa dinasti Jakri bukan hanya mirip dengan raja-raja di wilayah jajahan, namun bahkan mirip dengan gubernur jenderal kolonial di tanah jajahan. Ini terbukti bukan hanya dengan terjalinnya kontak dan kerja sama dinasti Jakri dengan dinasti-dinasti Eropa, namun merembes pada penerimaan ide-ide khas Eropa semisal "Russifikasi" dinasti Jakri. Melalui aparat militernya yang menjadi alat represi internal, dinasti Jakri lebih mirip kolonial pribumi.

Suara-suara populis-radikal mulai muncul pada 1932 ketika meletus kudeta militer pertama yang mencoba mengakhiri absolutisme monarki di Thailand. Namun energi militer hari itu belum mampu membebaskan diri sepenuhnya dari tradisi dan perspektif absolutisme yang ditentangnya, ini terbukti dengan tiadanya basis legitimasi bagi militer sebagaimana yang dinikmati dinasti Jakri. Terombang-

ambing antara absolutisme dinasti dan nasionalisme populer menyebabkan stagnasi dalam kehidupan politik Thailand. Stagnan karena representasi legitimasi yaitu dinasti Jakri telah dibuat mandul, sedangkan legitimasi internal dan eksternal belum digapai.

Yang menyulut mengapa nasionalisme populer Thailand tercipta bukanlah sesuatu yang khas Thailand, melainkan kehadiran militer dan ekonomi Amerika Serikat sebagai respon atas perang Vietnam. Hotel, bank, supermarket, tempat pelacuran dan nilai khas non-Thailand telah menyulut apa yang Anderson sebut nasionalisme populer Thailand. Penjelasannya sebagai berikut.<sup>18</sup>

Pada 1973 tercipta demonstrasi-demonstrasi besar yang dipelopori dosen, mahasiswa, intelegensia kota yang berakhir dengan jatuhnya rezim Praphat dan Thanom, rezim yang meneruskan kediktatoran rezim Sarit sebelumnya. Pada 1958–1973, kedua rezim tersebut telah mengubah banyak hal di Thailand; pada segmen ekonomi, Thailand sangat giat dalam upayanya mengkapitalisasi pedesaan dan menggalakkan industrialisasi substitusi import yang pada gilirannya berubah haluan menjadi eksport, diiringi bantuan ekonomi dan militer gila-gilaan dari Amerika Serikat sebagai reaksi atas perang Vietnam. Pada segmen politik berupa sentralisasi kekuasaan negara pada tangan tentara dan menjamurnya praktek-praktek politik represif dengan retorika anti-komunis dan pro-Amerika; secara sosial dengan hadirnya pelacuran, hotel dan penetrasi nilai-nilai khas Barat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 278-282

Peristiwa 1973 telah menyulut nasionalisme populer yang membalikkan logika tersebut, sehingga atmosfer terbuka, populis, representatif pernah dinikmati Thailand sampai pada tahun 1976 ketika kekuatan-kekuatan konservatif kembali mengukudeta pemerintahan populis tersebut.

### E. Nasionalisme Filipina

Ada dua hal yang menyusun analisis Ben Anderson terhadap nasionalisme Filipina.<sup>19</sup> *Pertama*, penjelasan mengenai asal-usul nasionalisme Filipina dan *kedua*, deskripsi atas 'orang Filipina pertama' Jose Rizal.<sup>20</sup> Yang pertama bertumpu pada analisis kelas yang non-Marxis, sedangkan yang kedua bertujuan menjelaskan perkembangan nasionalisme Filipina kontemporer. Kedua hal tersebut tetap diwarnai ciri khas Ben Anderson, yaitu orisinalitas yang tinggi dan pembangunan argumen yang berlainan dengan asumsi mapan tentang nasionalisme Filipina.

Komposisi kelas Filipina sangat ditentukan oleh mata kolonial Spanyol yang menjajah negeri itu selama 3 abad. Bagi Spanyol yang tidak mengerti keragaman etnik, kemanapun ia berlayar di wilayah Asia Tenggara, ia hanya akan mengelompokkan manusia yang ditemuinya sebagai *chino*. Selama ini masyarakat di kepulauan tersebut saling mengenal dan mengidentifikasi sebagai sesama berdasarkan profesinya; pedagang, prajurit, peziarah, pengelana dan seterusnya. Klasifikasi *chino* ini berkembang disebabkan oleh politik kolonial serta persaingan masyarakat jajahan, menjadi *Cacique* (borjuis kelas atas yang mengotrol *hacienda*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 250-3, 403-416

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 404

atau perkebunan tradisional berbentuk tanah luas yang mengelilingi satu blok rumah), *mestizo* (campuran Cina dan suku lain), *spanidas* (kolonial Spanyol), *indio* (pribumi), atau dalam istilah yang lain masyarakat jajahan dikelompokkan sebagai *principales*, *hidalgos*, *pecheros*, dan *esclavos* (para pengemis, para priyayi, kawula biasa dan para budak) yang diadaptasi dari penggolongan sosial Iberia abad pertengahan.<sup>21</sup>

Nama Filipina berasal dari kaisar Felipe II yang pada dasawarsa 1560-an menduduki kepulauan tersebut. Kolonialis Spanyol, karena alasan bisnis (barter sutra Cina dengan perak Meksiko yang dijual kembali dengan harga tinggi ke Eropa), telah mengubah ekonomi setempat dari ekonomi berbasis *hacienda* dan pertambangan menjadi ekonomi berbasis perdagangan, menyebabkan Manila menyerap begitu banyak generasi muda dari pedalaman. Kebijakan longgar kolonial yang ditunjukkan dengan rendahnya niat mengeksploitasi penduduk pribumi sebagai tenaga kerja dengan cepat membentuk elit *mestizo*, segmen sosial-ekonomi yang langsung menyadari kekayaannya, belajar ke Eropa. Namun, pembentukan kelas menengah juga begitu terpengaruh oleh imigrasi kaum *sangleys* (Cina, sebagaimana mereka disebut hari ini). Pada 1834, Manila adalah satu dari pusat perniagaan internasional di kawasan itu dengan energi Cina yang menggerakkannya, setelah penghapusan larangan imigrasi dari Cina.<sup>22</sup>

Hubungan unik antara kaum *Spanidar* yang Anglo-Saxon, *mestizo* dan Cina yang longgar dan berorientasi ekonomi telah memutuskan jalan bagi elit *mestizo*

<sup>21</sup> Lihat Ben Anderson, *Imagined Communities* hal 255-6

<sup>22</sup> Lihat Ben Anderson, *Hantu Komparasi*, hal 349

untuk mengirimkan anak-anaknya sekolah ke Eropa. Selama dasarwarsa 1880-an, terbentuklah kelompok cendekiawan real pertama yang yang berasal dari koloni tersebut, menamakan dirinya kaum *ilustrado* (orang-orang tercerahkan) dan memulai serangan budaya terhadap dominasi agama, budaya dan politik Spanyol. Kebersamaan (belajar sesama, membaca buku yang sama, pacaran dan tak jarang terjadi pernikahan) ini memupuk kesadaran sendiri mengenai suatu status *mestizo* Filipina raya (kecuali wilayah Moro) dengan sesepuh masing-masing yang telah membentuk kelompok-kelompok *cacique* yang berserakan di provinsi-provinsi. Orang-orang inilah pada abad tersebut, mulai menyebut dirinya kaum "*Filipino*".<sup>23</sup>

Maka mulailah meledak serentetan pemberontakan-pemberontakan (meski tidak selalu ditunggangi kaum *ilustrado*) sampai pada tahun 1910. pada tahun 1899 suatu republik Filipina diproklamirkan di bawah pimpinan Emilio Aguinaldo, namun sangat rentan. Republik ini tidak memperoleh sambutan dari daerah muslim barat daya. Beberapa bagian Vaisaya dan wilayah Lozon yang masih meneruskan budaya radikalisme.

William McKinley, administrator Amerika Serikat, terlibat perang dengan Spanyol pada bula April 1898, yang berhasil memukul mundur Spanyol. Maka dijuallah republik itu ke Amerika Serikat pada perjanjian Paris. Maka masuklah Amerika Serikat yang mengubah hampir segalanya. Pertama, Amerika Serikat memastikan unifikasi politik kepulauan itu, termasuk memukul habis daerah-daerah muslim yang selama ini selalu gagal dilakukannya Spanyol. Kedua, Amerika Serikat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 351

memberikan kaum *mestizo* kesejahteraan ekonomi yang begitu besar. Ini berimbas pada terciptanya kelas sosial dengan endapan dana yang begitu besar yang memutuskan perkembangan selanjutnya, yaitu yang ketiga, inovasi politik Amerikalah yang menciptakan —dengan kebijakan sebelumnya— orde ekonomi-politik nasional yang solid dan visioner, ini mewujud pada pembentukan dewan kongres yang berbasis pemilihan umum. Birokrasi politik inilah yang menciptakan bayangan tentang nasionalitas Filipina hari ini. Ben Anderson memotret bahwa strategi Amerika Serikat ini berhasil dengan sukses karena ditopang oleh kemampuan bahasa Inggris yang menjembatani komunikasi wilayah-wilayah kepulauan tersebut yang terpecah ke dalam beberapa bahasa ibu/daerah.<sup>24</sup>

Tak banyak komentar Ben Anderson tentang invasi Jepang dalam mempengaruhi Filipina sebagai komunitas yang dibayangkan, penyusun menemukan bahwa Ben Anderson lebih tertarik mendiskusikan Jose Rizal, “orang Filipina pertama”, seorang dokter, sejarawan, penulis dua novel legendaris, *Noli Me Tangere* (terbit pertama kali di Berlin pada tahun 1887) dan *El Filibusterismo* (terbit pertama kali di Ghent pada tahun 1891) dalam kaitannya dengan nasionalisme Filipina. Lahir pada tahun 1861, Jose Rizal mengenyam pendidikan terbaik di kawasan Asia Tenggara, sebab berbeda dengan daerah koloni lain, Filipina memperoleh akses pada pengetahuan Barat dengan didirikannya satu-satunya universitas gaya modern di kawasan tersebut. Karena tekanan kolonial, Rizal diam-diam berangkat ke Spanyol guna melanjutkan pendidikan kedokterannya, lantas menghabiskan lima tahun lagi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 418



di Eropa mempelajari budaya kolonial dan dengan antusias mempelajari bahasa Perancis, Jerman, Inggris. Eropa menyadarkan Rizal dua hal, keterbelakangan Spanyol dari negara-negara besar Eropa yang memberinya alasan satir untuk menertawakan penjajahannya dan ia menemukan sensasi yang kemudian ia namakan "*eldemonio de las comparaciones*" atau "hantu perbandingan".<sup>25</sup> Yang ia maksud dengan frase tersebut adalah perasaan ganda yang lahir dari perbandingan Manila dan Berlin, atau mustahil memikirkan Berlin tanpa membandingkannya dengan Filipina. Menurut Ben Anderson, disinilah sebenarnya semua cikal-bakal nasionalisme yang lahir dari atau karena membuat perbandingan-perbandingan.

*Noli* dan *Fili* ditulis dalam bahasa Spanyol, lingua Franca pada dekade akhir penjajahan Spanyol. Dengan anggun, Rizal berbicara kepada *indionya* lewat tokoh, tempat, lekuk kota Manila yang begitu hidup ia gambarkan, tentang bobroknya praktek agama di Manila<sup>26</sup> serta timpangnya masyarakat Rizal dari nilai-nilai kebersamaan, kemerdekaan, dan kejujuran. Ia dengan antusias lewat metode penulisan yang bertanya kepada pembacanya seolah-olah sedang menoleh dari jalur cerita kepada pembaca-menunjukkan akar kata "Filipina", statifikasi sosial zamannya, minimnya moralitas dan di atas itu semua, *Noli* dan *Fili* merayakan pembayangan "kita" sebagai *Las Filipinas*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 407

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 443

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 435

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ben Anderson mendefinisikan nasionalisme sebagai paham atau gerakan yang menghidupi suatu nasion, yang merupakan komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.

1. Nasionalisme tumbuh seiring mulai merapuhnya dua sistem budaya yang menyediakan legitimasi bagi pemaknaan kolektivitas sebagai komunitas (Komunitas Religius dan Ranah Dinasti) serta bergesernya pemahaman waktu (dari kesadaran waktu yang bersifat kosmologis-auratik menjadi kesadaran waktu yang linear berdasarkan pengukuran jam kalendris, atau “waktu hamparan homogen”)
2. Ben Anderson membagi perkembangan nasionalisme ke dalam empat tahap. Yaitu; *pertama*, nasionalisme kerakyatan/kebahasaan, *kedua*, nasionalisme resmi, *ketiga*, nasionalisme anti kolonial, dan *keempat*, nasionalisme jarak jauh.
3. Nasionalisme negara-negara Asia Tenggara merupakan nasionalisme anti kolonial yang memperoleh inisiasi bentuk negara merdeka dari penjajahnya, melalui institusi pembayangan seperti peta, sensus dan museum.
4. Nasionalisme Filipina menurut Ben Anderson mulai diinisiasi oleh kaum kreole (peziarah sekular) dengan kemampuan bilingual, bahasa Ibu/Daerah serta bahasa

kolonial. Peziarah sekular inilah yang mulai membayangkan diri sebagai pewaris ruang dan praktek sosial selepas penjajah pergi.

5. Nasionalisme Thailand, dengan menyanggah konsensus ilmiah seputar budaya khas Thai seperti inkolonialisasi yang dialaminya, Ben Anderson menunjukkan bahwa kedatangan Amerikalah serta perangkat politik, budaya dan sosialnya, yang menginisiasi nasionalisme Thailand.
6. Nasionalisme Indonesia, negara yang begitu dicintai oleh Ben Anderson, menurutnya bertipe nasional, bukan sosial, sehingga yang berubah hanyalah status simbolis dari objek kolonialisme menjadi negara modern. Akan tetapi, kemelaratan sosial dan ekonomi tetap dirasakan rakyat.

## B. SARAN

Penyusun, berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, dengan kerendahan intelektual mengemukakan dua saran sebagai pertimbangan ringan dalam rangka *follow up* penelitian, yaitu; *pertama*, hendaknya perhatian peneliti masalah studi Hubungan Internasional lebih ditingkatkan pada masalah kultural dengan signifikansi politik tinggi seperti migrasi, sehingga analisis konvensional politik internasional seperti terorisme bisa lebih dipahami, berdasarkan analisis kultural tadi.

*Kedua*, dan sifatnya yang masih berupa hipotesis penyusun berdasarkan pembacaan penyusun atas konsepsi Ben Anderson, analisis Hubungan Internasional, setidaknya dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, hendaknya memperhatikan

artefak-artefak budaya politik internasional seperti media dengan gaya hidup kosmopolitan yang diusungnya, paspor, akta kelahiran, ruang-ruang netral politis seperti internet, bandara, bursa efek, dan ini yang penyusun sadari sebagai pembaca Ben Anderson, *influens* (pengaruh politik, ekonomi, sosial, budaya) penulis-penulis *best seller* internasional mulai dari penulis sastra, filsafat, budaya populer dan atau gaya hidup, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya.

Penyusun menyadari bahwa hambatan terberat ketika hal-hal diatas ingin dikaji ada pada metodologi penelitian. Namun, metodologi pada dirinya sendiri bukanlah masalah. Yang menjadi titik berbeda adalah paradigma yang memakai metodologi tertentu untuk menjelaskan asumsi-asumsi yang ingin dijelaskannya. Paradigma realisme, liberalisme, marxisme/strukturalisme hendaknya dilengkapi dengan paradigma yang sifatnya terbuka pada objek analisis berupa hal-hal yang merupakan artefak politis dalam interaksi Hubungan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, *Kuasa-Kata*, Matabangsa, Yogyakarta; 2000
- \_\_\_\_\_ *Hantu Komparasi*, Qalam, Yogyakarta; 2002
- \_\_\_\_\_ *Imagined Communities*, Insist & Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002.
- Dewanto, Nirwan, *Senjakala Kebudayaan*, Bentang, Yogyakarta; 1998
- Griffiths, Martin, *LimaPuluh Pemikir Studi HI*, Murai Kencana, Jakarta; 2001.
- Hadis, Vedi R. *Budaya, Politik dan Perubahan Sosial*, Gramedia, Jakarta; 1992.
- Hardiman, F. Budi, *Heidegger dan Mistik Keseharian*, Gramedia, Jakarta; 2003
- Ingleson, Jhon, *Jalan Ke Pengasingan*, LP3S, Jakarta; 1983
- Jurgensmayer, Mark, *Menentang Negara Sekular*, Mizan, Bandung; 1998
- Kristanto, JB., Nirwan Ahmad Arsuka (Editor), *Esei-Esei Bentara 2002*, Kompas, Jakarta; 2002
- Mohamad, Goenawan, *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*, Pustaka Alvabet, Yogyakarta; 2001
- Piliang, Yasraf A., *Transpolitika*, Jalasutra, Bandung & Yogyakarta; 2005.
- Poole, Rose, *Moralitas dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta; 1992.
- Redana, Bre dkk (editor), *Esei-Esei Bentara 2003*, Kompas, Jakarta; 2003
- Ritzer, George & Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta; 2005
- Sabine, G.H., *Teori-Teori Politik*, Bina Cipta, Bandung; 1992.
- Said, Edward W., *Kebudayaan dan Kekuasaan*, Mizan, Bandung; 1995
- \_\_\_\_\_ *orientalisme*, Pustaka, Bandung; 1996
- Socprapto, R., *Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1997